



JURNAL POLITICON

Volume XII, No. 1, April 2024

ISSN 2252-3029

**PROGRAM STUDI
ILMU POLITIK**

SAMBUTAN EKSEKUTIF

Puji Syukur kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena atas perkenanannya Jurnal Politicon dapat diterbitkan kembali, dengan senang hati dan bangga, saya sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana menyambut baik terbitnya jurnal Politicon Universitas Nusa Cendana Volume XII Nomor 1 Tahun 2024. Penerbitan jurnal ini terlaksanan atas kerjasama baik lembaga-lembaga penelitian dan rekan-rekan yang telah menyumbangkan tulisannya dalam penerbitan jurnal ini.

Melalui mitra kerja dan para ahli dalam bidangnya, berharap setiap paper yang diterbitkan memiliki mutu ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan. Semoga kedepan jurnal ini akan memperoleh akreditasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga pengetahuan Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Ketua Laboratorium, Tim Editor dan Tim Reviewer Jurnal Politicon yang telah bekerja keras untuk dapat menyelesaikan proses penerbitan jurnal ini. Akhir kata saya ucapkan selamat atas terbitnya jurnal Politicon. Semoga dapat menjadi rujukan utama dalam bidang ilmu politik di berbagai tempat.

Kupang, 01 April 2024

Esrah D.N.A Benu

SUSUNAN REDAKSI JURNAL POLITICON

PELINDUNG/PENASEHAT

Dr. Willam Djani, M.Si

PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNG JAWAB

Esrah D.N.A Benu, S.Sos.,MA

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Alfridus S.D. Dari, S.Fil.,MA

PEMIMPIN REDAKSI

Ananias Riyoan Philip Jacob, S.Ip.,M.Ip

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Yohanes Fisher Keon, S.Fil.,MPA

MITRA BESTARI

Prof. Dr. Purwo Santoso, MA, Ph.D

Prof. Dr. Edwar Aspinall

Sylvia Tidey, Ph.D

DEWAN REDAKSI

Rudi Rohi,M.Si; Boli Tonda Baso, M.Si;

Yohanes Jimmy Nami,M.Si; Diana S.A.N. Tabun. M.Ip; Rouwland

Benyamin, M.Si; Rex Tiran, M.Ip; Syahrin Kamahi, M.Si; Sri Chatun ,M.Si

Frans W. Muskanan, M.Si; Yeftha Y. Sabaat, M.Ip;

Frans B.R. Humau, M.Ip, Akhmad Syafruddin, MA

EDITOR

Ananias Riyoan Philip Jacob, S.Ip.,M.Ip

Alamat Redaksi

Prodi. Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus Fisip - Undana

Jln. Adisucipto, Penfui, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, 85228

email: politicon.undana@gmail.com

p-ISSN 2252-3049

e- ISSN _____

DAFTAR ISI

Perilaku Pemilih Atoni Pah Meto Dalam Pilkada Tahun 2022

Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

Putri Sri Juningsi Lindia Sari Bolla, Rex Tiran, Diana S.A.N Tabun 1-6

Fenomena Golput Dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019

Studi Kasus di Dapil 1 Kecamatan Katikutana Desa Umbu Riri

Erni Rambu Day Atadjawa, Alfridus S D Dari, Ananias Riyoan Philip Jacob 7-13

Tata Kelola Objek Taman Wisata Kuliner Di Pantai Kelapa Lima Kota Kupang

Maria Imelda Soba, Ananias Riyoan Philips Jacob, Alfridus S. D Dari 14-20

Fenomena Golput Dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019

Esrah D.N.A Benu, Frans Wilmat Muskanan 21-27

Tata Kelola Sumber Daya Alam Dalam Demokrasi Lokal

Studi Kasus Penolakan Proyek Geotermal Pltp Ulumbu Di Desa Lungar Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Tahun 2023

Marselinus Karno, Rudi Rohi, Yohanes Jimmy Nami 28-36

Komunikasi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021

Studi Tentang Budaya Pahappa Sebagai Media Komunikasi Politik Di Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur

Yakobus Tamu Ama, Rex Tiran, Yeftha Yerianto Sabaat 37-41

Dinamika Praktik Perjudian Dalam Pemilihan Kepala Desa

Studi Tentang Praktik Judi Dalam Pemilihan Kepala Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang

Roni Seriano Nope, Esrah D.N.A Benu, Yonathan Lopo 42-46

Politik Identitas Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020

Studi Di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur

Aloysius Gonsaga Abi , Ananias Riyoan Philip Jacob, Syahrin B. Kamahi 47-54

PERILAKU PEMILIH *ATONI PAH METO* DALAM PILKADES TAHUN 2022
Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang

Putri Sri Juningsi Lindia Sari Bolla ^{1*}, Rex Tiran ², Diana S.A.N Tabun ³

¹Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana

²Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana

³Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana

* bollaputri50@gmail.com

Abstrak

Perilaku Pemilih Atoni Pah Meto Dalam Pilkades Tahun 2022 (Studi Kasus Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang). Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Perilaku pemilih secara sederhana dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dalam menentukan pilihannya yang menurutnya paling cocok atau tidak cocok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perilaku Pemilih Atoni Pah Meto dalam Pemilihan kepala desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri dari Pemerintah Desa Oemasi, Tokoh Adat Desa Oemasi, Masyarakat Atoni Pah Meto Desa Oemasi, Tokoh Agama Desa Oemasi, Panitia Pilkades Desa Oemasi, Calon Kepala Desa Oemasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilih bisa dilihat dari suku, ras, etnis dan agama sama dimana hubungan kekerabatan masih menjadi tolak ukur bagi mereka. Akan tetapi sejauh ini sudah ada banyak orang lebih paham dalam pemilihan terlepas dari apa yang sudah menjadi tolak ukur diatas. Bisa dibilang bahwa masyarakat saat ini lebih pintar melihat seseorang setidaknya memiliki pembawaan diri dan memiliki sifat yang mampu merangkul masyarakat terlepas dari latar belakang pendidikan. Mengenai Perilaku pemilih dilihat dari segi pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional bahwa masyarakat di Desa Oemasi masih ada beberapa orang yang menggunakan pemahaman bahwa pemilih bisa dilihat dari suku, ras, etnis dan agama sama dimana hubungan kekerabatan masih menjadi tolak ukur bagi mereka. Tetapi bisa dilihat dari tiga pendekatan diatas perilaku pemilih masyarakat Desa Oemasi lebih condong ke Pendekatan Psikologis dimana masyarakat melihat dari ketidakpuasan kepala desa yang bisa dibilang anak kampung sendiri tetapi tidak membuat perubahan di Desa tersebut maka dari itu masyarakat membuat terobosan baru untuk memilih orang pendatang yang juga mereka kenal untuk menjadi pemimpin dan hasil dari memilih orang pendatang sangat baik karena Desa Oemasi sudah ada warna baru dan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kata kunci: Perilaku Pemilih, Atoni Pah Meto, Pilkades.

Pendahuluan

Penelitian ini ingin menjelaskan tentang Perilaku Pemilih *Atoni Pah Meto* Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang menggunakan pendekatan Perilaku Pemilih dengan tiga sub fokus pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan pilihan rasional. Studi ini secara spesifik ingin mendeskripsikan Perilaku pemilih secara sederhana dapat diartikan sebagai perilaku seseorang dalam menentukan pilihannya yang menurutnya paling cocok atau tidak cocok. Perilaku pemilih dapat dikaitkan dengan adanya proses pemilihan umum di suatu daerah, negara atau wilayah tertentu. Tidak hanya dalam pemilu tetapi demokrasi lokal di desa (Pilkades) menjadi faktor penentu seorang memilih, Pilkades sebagai demokrasi pada tingkat lokal memiliki

pengaruh pada pilihan politik masyarakat di tingkat Daerah dan Nasional. Perilaku pemilih terdapat dua komponen dasar yang saling berhubungan dan mendapatkan perhatian paling besar, yaitu partisipasi politik dan pilihan politik. *Atoni pah meto* merupakan kata majemuk yang terdiri dari atoni (dapat berarti laki-laki dan berarti juga kelompok orang/suku bangsa). Pah, berarti tempat atau wilayah. Meto, berarti kering atau daratan. Dengan demikian, atoni pah meto, adalah orang yang mendiami daratan sekaligus nama penduduk Pulau Timor bagian Barat, khususnya yang mendiami Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan, dan sebagian Kabupaten Kupang. Sebutan *Atoni Pah Meto* sekaligus membedakan *Atoni Pah Meto* dengan orang lain atau pendatang yang disebut “*kase*”. Desa Oemasi sendiri mengartikan Atoni Pah Meto yang berada di Desa tersebut juga sama seperti pemahaman pada umumnya, Karena di desa Oemasi juga memiliki pemahaman yang sama bahwa orang pendatang disebut sebagai “*Kase*” dan orang yang menetap disitu sudah sejak lama disebut sebagai Atoni Pah Meto.

Dalam perkembangannya, perilaku pemilih yang terjadi di Desa Oemasi bisa dilihat dari tiga pendekatan di Desa Oemasi masih ada beberapa orang yang menggunakan pemahaman bahwa pemilih bisa dilihat dari suku, ras, etnis dan agama sama dimana hubungan kekerabatan masih menjadi tolak ukur bagi mereka. Tetapi bisa dilihat dari tiga pendekatan diatas perilaku pemilih masyarakat Desa Oemasi lebih condong ke Pendekatan Psikologis dimana masyarakat melihat dari ketidakpuasan mantan kepala desa yang bisa dibilang anak kampung sendiri tetapi tidak membuat perubahan di Desa tersebut maka dari itu masyarakat membuat terobosan baru untuk memilih orang pendatang yang juga mereka kenal untuk menjadi pemimpin dengan pembawaan diri yang sangat baik dan memiliki program-program yang jelas akan bisa mensejahterahkan masyarakat dan hasil dari memilih orang pendatang saat ini di Desa Oemasi sudah ada warna baru dan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik pokok, yakni mementingkan makna, konteks dan dalam proses penelitian yang lebih bersifat siklus dari pada linear. Dengan pengumpulan data dan analisa data berlangsung secara simultan, lebih mementingkan kedalaman ketimbang keluasan penelitian, sedangkan peneliti sendiri merupakan instrument utama. Pemilihan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan menganalisis sebuah bentuk perlawanan perbudakan seks yang dilakukan oleh perempuan Malaka dimasa Kolonial Jepang. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Sedangkan fokus penelitiannya diarahkan kepada resistensi perempuan dimasa Kolonial Jepang terhadap perbudakan seks berupa tato yang dibuat perempuan Malaka. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan tentang makna dari topik yang menjadi permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan tentang Resistensi Perempuan Dimasa Kolonial Jepang Terhadap Perbudakan Seks. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Desa Uma To'os, Kecamatan Malaka Barat , Kabupaten Malaka.

Hasil

Tradisi keluarga memiliki hubungan kekerabatan atau sebagainya tidak menjadi penghalang untuk menyalurkan atau mengusulkan nama yang dirasa memiliki jiwa membangun dan sosok bijaksana yang mampu merangkul seluruh masyarakat yang ada di Desa Oemasi. Karena melihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak perubahan yang sudah dibuat

oleh beliau semasa jabatannya menjadi sekretaris desa sebelum terpilihnya menjadi kepala desa saat ini. Buat apa kalau memilih anak kampung sendiri dan memiliki hubungan keluarga tetapi memiliki sosok yang sombong dan acuh tak acuh sehingga ini pada akhirnya pun akan dapat merusak desa, karena masyarakat Desa Oemasi masih menganggap bahwa anak asli dan anak kampung itu berbeda.

Pada dasarnya pemikiran dari Beliau bahwa ia menganggap orang asli dan pendatang itu sama saja karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada sang pencipta, tetapi banyak masyarakat Desa Oemasi yang masih menggunakan pemahaman kalau orang asli dan orang pendatang itu berbeda karena mereka anggap bahwa merekalah yg pertama kali mendiami desa tersebut jadi merekalah orang asli desa itu. Tetapi bisa dibilang bahwa orang pendatang hidup mereka lebih maju dari pada orang asli Desa Oemasi, karena menurut Beliau pola pikir pendatang dan orang asli berbeda jauh dimana para pendatang lebih memfokuskan untuk membangun yang sekiranya dirasa belum maksimal atau tertinggal sedangkan orang asli memiliki sifat acuh tak acuh dimana mereka menganggap bahwa semuanya telah dimiliki oleh masing-masing pada setiap rumah tangga. Memang jika dilihat dari kehidupan masyarakat disana dari beberapa dusun yang ada mayoritas lebih banyak “atoni pah meto” dari pada “kase” sehingga pada akhirnya para pendatang tidak diberikan ruang gerak atau kesempatan untuk menjadi pemimpin. Memang dalam hal melibatkan diri dalam memberikan suara, tempat tinggal, dan dalam hal keagamaan mereka masih diberikan ruang besar akan tetapi dalam hal mengatur desa mereka hanya dijadikan masyakat biasa. Pada akhirnya untuk pertama kali Beliau memberikan terobosan baru dimana Beliau hanya sebagai perantara untuk ide dari masyarakat untuk membangun Desa Oemasi. Tapi tidak bisa dipungkiri walaupun perberdaan yang terjadi tetapi banyak masyarakat Desa Oemasi yang memilih beliau menjadi kepala desa karena suku,etnis, dan ras yang sama.

Masih ada masyarakat yang memilih seorang pemimpin melihat dari suku yang sama tetapi juga melihat bagaimana sikap dan tindakan seseorang dalam menyampaikan aspirasi mereka didepan umum. Bapak Ayub juga adalah salah satu orang yang tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan. Walupun diisukan sebagai pendatang tetapi masyarakat tidak mempersalahkan itu melainkan mereka memilihat karena satu suku dengan mereka. persamaan suku,ras,agama masih sangat melekat dalam pemilihan kepala desa di Desa Oemasi, tidak bisa dipungkiri karna masih ada orang yang berpemikiran lebih baik memilih orang yang kita kenal dan memiliki suku, dan agama yang sama karena pastinya saat otang tersebut menjadi pemimpin akan memperhatikan kita masyarakat kecil yang sesuku.

Pembahasan

Ketidakpuasaan dari masyarakat Desa Oemasi terhadap mantan Kepala Desa yang lama membuat masyarakat lebih belajar dan melihat apa yang sudah terjadi sebelumnya. Masalah suku, ras, etnis dan agama tidak menjadi tolak ukur bagi mereka akibat dari ketidakpuasan tersebut. Di tahun sebelumnya saat anak kampung menjabat banyak hal yang tidak bisa dilakukan baik dari segi janji maupun program yang sudah dirancang. Memang ada program yang berjalan tetapi rules yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyakat mereka gunakan untuk keluarga dan kekerabatan yang mereka rasa memihak kepada mereka artinya disini mereka bersifat tidak adil. Sebenarnya saat ini ada pemikiran yang masih dipertahankan dari segi kekerabatan dan agama dimana masih ada sisi yang saling mempengaruhi. Pendatang dan orang asli tidak menjadi persoalan dimana jika seseorang datang untuk membangun di desa maka hal yang harus dilakukan adalah menerimanya karena itu tidak salah, bukan membuat mereka merasa terintimidasi sehingga membuat adanya batasan. Para pendatang tidak diberikan ruang untuk menyalurkan pemikirannya, memang adakalanya

mereka diberikan ruang tetapi dalam hal memimpin itu yang masih minim. Lebih baik memilih seorang pemimpin yang bisa merangkul dan memperhatikan hidup masyarakat kedepan daripada memilih pemimpin yang lebih mengutamakan keluarga dibanding masyarakat yang membutuhkan. Karena dari pribadi Bpk Yohanis Nana beliau memilih Ayub Nenogasu dilihat dari bagaimana ia membangun budaya dan masyarakat Desa Oemasi, bukan melihat dari ia orang pendatang, karena sama saja memilih anak kampung sendiri selama satu periode tidak ada perubahan yang terjadi.

Kalau dilihat dari penjelasann diatas bahwa baik anak asli kampung maupun pendatang tetapi memiliki pembawaan diri baik maka itu akan menjadi nilai tambah sebagai calon pemimpin yang baik, maka sebabnya mereka memberikan kesempatan untuk beliau yang disebut sebagai pendatang agar menjadi salah satu bakal calon kepala desa karena mereka yakin dengan apa yang sudah dibuat beliau sebelum menjadi kepala desa. Pada awalnya mereka sangat memperhitungkan anak kampung sendiri karena anak kampung lebih mengenal masyarakat Desa Oemasi sendiri dibandingkan dengan orang pendatang, tetapi apa yang mereka yakini akhirnya tidak terjadi sesuai keinginan karena bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya setelah anak kampung sendiri yang memimpin tidak ada perubahan yang terjadi di Desa Oemasi, Oleh karena itu peran tokoh adat sangat berpengaruh bagi masyarakat sehingga pada akhirnya pun di buat sadar dengan pilihan yang akan mereka tentukan

Pada awalnya untuk anak-anak asli kampung Desa Oemasi biasanya selalu diperhitungkan untuk menjadi sosok pemimpin yang baik sebagai kepala desa di Desa Oemasi, akan tetapi kepala desa sebelumnya membuaat suatu catatan buruk bagi masyarakat Desa Oemasi sehingga mereka merasa ada ketidakpuasaan terhadap anak kampung maka akan jauh lebih baik jika kami memilih orang yang mampu untuk mensejahterahkan masyarakat. Pengalaman yang dialami oleh responden sendiri bahwa kepala desa sebelumnya yakni Bapak Antonius Konis menggambarkan ketidakadilan dimana salah satu program yang dijalankan oleh beliau lebih mementing keluarga dibandingkan masyarakat yang membutuhkan, contohnya dalam hal konflik antara keluarga beliau akan sangkutpautkan dalam pembagian program yang beliau jalankan.

Karena belum tentu anak kampung yang menjabat sebagai kepala desa bisa atau mampu untuk membangun desa buktinya saja bahwa dalam beberapa tahun sebelumnya anak kampung yang menjabat sebagi kepala desa membuktikan bahwa ketidakmampuan seorang akan kampung membangun desa sehingga wajah Desa Oemasi menjadi baik akan tetapi dilihat dari pemilihan kemarin dengan terpilihnya Bapak Ayub Nenogasu sebagai kepala deas di Desa Oemasi sudah ada munculnya perubahan yang dari tahun ketahun tidak pernah berubah tapi saat ini sudah ada perubahan sedikit dan kalau untuk kesejahteraan masyarakat memang saat ini belum terukur dengan jelas karena masa jabatan beliau yang masih sangat mudah, akan tetapi dalam proses berjalan masyarakat yakin bahwa ini akan menjadi suatu pembuktian bahwa orang yang bukan asli kampung Desa Oemasi dapat memberikan wajah baru dari Desa Oemasi itu sendiri.

Dalam hal ini biasanya dalam menentukan pilihan masing-masing orang mereka berpatokan pada kekerabatan, agama, suku dan ras tetapi ada juga yang melihat bagaimana seseorang datang membawa dirinya dan potensi yang dia miliki untuk membangun tempat yang ditempatinya. Sama halnya dengan pemikiran dari beberapa orang yang ada di Desa Oemasi dimana mereka tidak melihat seseorang dari segi suku, ras, etnis dan agama atau sekalipun kekerabatan tetapi mereka melihat bagaimana seseorang datang untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat diatas kepentingan dirinya sendiri.

Sebagai kaum minoritas dan juga sebagai pendatang yang sudah tinggal sejak lama di Desa Oemasi, saya tidak terlalu mengenal beliau tetapi dengan pembawaan diri dari beliau

itulah yang menjadi tolak ukur memilih seseorang pemimpin yang membangun, tidak melihat dari segi agama tapi melihat dari bagaimana menjadi pemimpin yang mengutamakan keamanan masyarakat, buktinya yang terpilih menjadi kepala desa saat ini beragama protestan. Beliau juga tidak hanya memperhatikan masyarakat kurang mampu tetapi juga dalam bidang pendidikan tidak tertinggal. Dengan terpilihnya Ayub Nenogasu sebagai kepala desa dalam bidang pendidikan tak luputpun dari perhatiannya. Menjadi suatu kebanggaan tersendiri dari pihak sekolah di tahun ajaran terakhir 2022 lalu Ayub Nenogasu mengalokasikan dana desa untuk para siswa-siswi dari kelas 1-6 yang berprestasi berupa uang beasiswa sebesar Rp. 700.000, sehingga membuat para siswa-siswa lebih giat dalam belajar dan bersekolah.

Ada masyarakat juga yang masih melihat bagaimana cara kerja dari bapak Ayub Nenogasu sebelum menjadi kepala desa, makanya mereka sangat yakin untuk memilih beliau dengan visi dan misi dari beliau agar bisa mensejahterahkan masyarakat. Buktinya sudah banyak perubahan yang terjadi khususnya di kantor desa sudah memiliki gedung sendiri untuk anak paud bersekolah, dan lebih tertata rapi karna sudah memiliki pagar batu dan juga tersedianya lopo. Semua itu adalah hasil musyawara bermufakat Bapak Ayub Nenogasu bersama dengan masyarakat untuk menata kantor desa agar terlihat sangat indah seperti kantor-kantor di perkotaan walaupun dalam pedesaan tetapi bisa dipuji-puji banyak tamu dari kota yang berkunjung.

Kesimpulan

Mengenai Perilaku pemilih dilihat dari segi pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional bahwa masyarakat di Desa Oemasi masih ada beberapa orang yang menggunakan pemahaman bahwa pemilih bisa dilihat dari suku, ras, etnis dan agama sama dimana hubungan kekerabatan masih menjadi tolak ukur bagi mereka. Tetapi bisa dilihat dari tiga pendekatan diatas perilaku pemilih masyarakat Desa Oemasi lebih condong ke Pendekatan Psikologis dimana masyarakat melihat dari ketidakpuasan mantan kepala desa yang bisa dibilang anak kampung sendiri tetapi tidak membuat perubahan di Desa tersebut maka dari itu masyarakat membuat terobosan baru untuk memilih orang pendatang yang juga mereka kenal untuk menjadi pemimpin dengan pembawaan diri yang sangat baik dan memiliki program-program yang jelas akan bisa menyejahterakan masyarakat dan hasil dari memilih orang pendatang saat ini di Desa Oemasi sudah ada warna baru dan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perilaku pemilih yang dilihat sejauh ini sudah ada banyak orang lebih paham dalam pemilihan terlepas dari apa yang sudah menjadi tolak ukur diatas. Bisa dibilang bahwa masyarakat saat ini lebih pintar melihat seseorang setidaknya memiliki pembawaan diri dan memiliki sifat yang mampu merangkul masyarakat terlepas dari latar belakang pendidikan.

Daftar Pustaka

- Bana, Honing Alvianto (29 Juni 2020). "Kepercayaan Atoni Meto Zaman Dahulu". www.quareta.com. Diakses tanggal 28 Agustus 2022.
- Hidayat Endik (24 Agustus 2020). "Oligarki Dalam Kekuasaan Di Pilkades" Penerbit: Airlangga University Press. Diakses tanggal 9 oktober 2023.
- Maschab Mashuri (Desember 2013) "Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia" penerbit PolGolv
- Ranjabar Jacobus (2021) "Perilaku Organisasi" penerbit ALFABETA cv Bandung
- M. A, Badeni. Dr. Prof (2017) "Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi" penerbit ALFABETA, cv Bandung
- Silab, Wilfridus; Kanahebi, O; Bessie, Soleman (1996/199). Rumah tradisional suku bangsa Atoni - Timor Nusa Tenggara Timur (PDF). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kantor Wilayah Propinsi Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Nusa Tenggara Timur. hlm. 21.

Abd. Chaidir Marasabessy 13 Oktober (2021) Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19.

Hendra Aditya Pratama 10 Februari (2019) Perilaku Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Di Smk Negeri 3 Watansoppeng).

Mopeng Esther Dwidyawati (2015) Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)

Susi Elfrida Marpaung (2016) Perilaku Pemilih Perempuan Etnis Batak Toba Pada Pemilihan Langsung Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Di Lingkungan Xiv Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan

FENOMENA GOLPUT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2019

Studi Kasus di Dapil 1 Kecamatan Katikutana Desa Umbu Riri

THE PHENOMENON OF ABSTAINER IN THE 2019 CENTRAL SUMBA REGENCY DPRD LEGISLATIVE ELECTION

Case Study in Election District One, Katikutana District, Umbu Riri Village

Erni Rambu Day Atadjawa^{1*}, Alfridus S.D. Dari², Ananias Riyoan Philip Jacob³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: erniramuday00@gmail.com

Abstract

The title of this research is the Abstention Phenomenon in the 2019 Central Sumba Regency Legislative Election (Case Study in Dapil 1 Katikutana District, Umbu Riri Village). The purpose of this study was to determine the phenomenon of abstention in Katikutana sub-district, Umbu Riri village in the 2019 DPRD legislative elections and to determine the factors that influence voters to abstain in the 2019 Central Sumba Regency DPRD legislative elections. The type of research used in this research is descriptive research using quantitative methods. The theory used in this research is the theory of political participation put forward by Gabriel Almond. The results of this study indicate that the phenomenon of abstention that occurred in electoral district 1 of katikutana sub-district, umbu riri village, in the 20019 DPRD legislative election. People with low education and the background of working as farm laborers, trading, farming, and migrating. Which must be done in everyday life and cannot be left behind, so they cannot give their voting rights. The factors that cause abstention are internal and external factors.

Keyword : Legislative Elections, Abstainer, Community Perticipation.

Abstrak

Judul penelitian ini yaitu Fenomena Golput Terhadap Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 (Studi Kasus di Dapil 1 Kecamatan Katikutana Desa Umbu Riri). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena golput di kecamatan katikutana desa umbu riri dalam pemilihan legislatif DPRD tahun 2019 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih sehingga golput dalam pemilihan legislatif DPRD kabupaten sumba tengah tahun 2019. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Teori yang di gunakan dalam penelitian ni adalah teori partisipasi politik yang di kemukakan oleh Gabriel Almond. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa fenomena golput yang terjadi pada dapil 1 kecamatan katikutana desa umbu riri, pada pemilihan legislatif DPRD tahun 20019. Masyarakat yang di mana rendahnya pendidikan dan melatarbelakangi bekerja sebagai buruh tani, berdagang, berladang, dan sedang merantau. Yang harus di lakukan dalam keseharian dan tidak bisa di tinggalkan, sehingga tidak dapat memberikan hak pilihnya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya golput karena adanya faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: Pemilihan Legislatif, Fenomena Golput, Partisipasi Masyarakat.

Pendahuluan

Golput (Golongan Putih) adalah penamaan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sekalipun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Golput dalam pemilu merupakan manifestasi dari sikap politik. Golput

dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum persentasenya semakin tinggi jika diukur secara rata-rata nasional, seperti pada pemilihan legislatif tahun 2019 dengan tingkat golput mencapai 29,68% yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan sebelumnya tahun 2014 yaitu 24,89% (Data KPU tahun 2019). Golput sejatinya merupakan sikap politik dalam merespons perhelatan elektoral atau pemilu. Sikap ini sebagai protes baik terhadap sistem maupun alternatif pilihan yang dipandang tidak ada yang kredibel untuk layak dipilih. Meski wujudnya berupa lebih memilih berlibur dari pada menggunakan hak pilih, sebenarnya fenomena itu tetap menggambarkan ketiadaan alternatif pilihan yang dinilai layak atau minimal dikenal untuk dipilih. Itu belum bicara alasan rekam jejak, visi-misi, kinerja buruk, dan lain-lain (Lestari, 2021 : 37-54).

Tingginya angka golput dapat menyebabkan sistem pemerintahan pada Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa, tidak berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan karena pemilu itu lebih kepada wujud demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). sehingga kurangnya partisipasi dari masyarakat menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, karena kurangnya dukungan politik. Golput bukanlah solusi yang tepat, dengan memberikan suara pemilihan umum, masyarakat turut serta dalam menentukan kualitas demokrasi, yang mempengaruhi kebijakan politik dan menghormati hak suara.

Penyebab dari adanya golput yang dikemukakan beberapa pengamat dan penyelenggaraan pemilu, dapat di kelompokkan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi kesalahan teknis dari diri sendiri seperti malas, telat bangun, ada keperluan mendadak dan lain-lain (Rinjani, 2014 : 6-3). Menurut Efriza dan Yoyoh Rohaniah (2015 : 25), faktor internal lain yang menyebabkan masyarakat golput, yaitu tidak tertariknya masyarakat dengan dunia politik atau memandang bahwa politik sebagai bagian yang tidak penting dan tidak terkait dengan kepentingannya (Apatis Politik). kemudian faktor eksternal golput meliputi kesalahan-kesalahan teknis dari petugas baik KPU, PPK, PSS maupun KPPS. Seperti masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang penyebab tingginya golput di Desa Umbu Riri pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Peneliti memberi judul penelitian “Fenomena Golput Dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 (Studi Kasus di Dapil 1 Kecamatan Katikutana Desa Umbu Riri)”.

Miryam Budiardjo mengatakan partisipasi politik secara umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya (Efriza, 2012;126).

Menurut Samuel P Huntington, Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya di anggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak maka akan lebih baik. Dalam implementasinya, tingginya tingkat partisipasi menunjukkan negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan politik.

Golput (Golongan Putih) adalah penamaan bagi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, sekalipun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT). Tren golput dalam beberapa pemilihan umum persentasenya cukup tinggi jika diukur secara rata-rata nasional. seperti pada pemilihan legislatif tahun 2019 dengan tingkat golput mencapai 29,68% yang lebih tinggi di bandingkan pemilihan sebelumnya tahun 2014 yaitu 24,89% (Data KPU tahun 2019). Golongan putih atau yang biasa disebut golput merupakan bentuk dari partisipasi politik kolektif, yaitu suatu kegiatan warga negara yang dilakukan secara serentak untuk mempengaruhi penguasa, misalnya seperti Pemilu. Golput juga merupakan bentuk dari partisipasi politik konvensional, yaitu dalam pemberian suara atau voting.

Dalam perilaku pemilih ada tiga teori yang menjelaskan penyebab seseorang golput pertama, teori sosiologis. seseorang tidak ikut dalam pemilihan akibat dari latar belakang sosiologis misalnya faktor agama, pendidikan, pekerjaan, ras, dan sebagainya. Kedua, teori psikologis. Keputusan seseorang untuk memilih atau tidak di tentukan oleh faktor psikologis. seperti kedekatan attachmen dengan partai atau kandidat yang ada. Ketiga, teori ekonomi politik. keputusan untuk memilih atau tidak di landasi oleh pertimbangan oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang tidak bisa membawa perubahan yang lebih baik atau ketidakpercayaan akan adanya perubahan, dan sebagainya.

Tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidakikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum di sebabkan oleh tiga faktor yaitu :

1. Sifat apatis ini lebih ke manifestasi kepribadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat atau kepuasan sehingga mereka tidak mempunyai minat terhadap politik.
2. Sifat anomie sikap ini menunjuk kepada sikap ketidakmampuan terutama pada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna akan tetapi ia merasa tidak dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata anomie adalah sikap jika hal ini menjadi ekstrim meluas akan mencakup suatu perasaan ketidakpercayaan dalam mengendalikan hidup secara umum.
3. Sifat alienasi Sikap ini berbeda dengan sikap apatis dan anomie. Sifat Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya.

Pemilihan Legislatif, yaitu pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi dan Kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengisian lembaga perwakilan dalam praktek ketatanegaraan lazimnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Pasca perubahan amandemen UUD 1945, Semua anggota lembaga perwakilan dan bahkan presiden serta Kepala Daerah dipilih dengan mekanisme Pemilihan Umum. Pemilihan umum menjadi 12 agenda yang diselenggarakan secara berkala di Indonesia.

Pemilihan umum secara umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, Serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Reynolds dalam Palupi (2015:24) menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Umum juga menyangkut metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan

diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Uyun (2016:23) menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.

Metode

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sejumlah fenomena yang berkenaan dengan masalah penelitian tanpa melihat hubungan antara variabel. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif di karenakan penelitian ini hanya terbatas pada usaha untuk menggambarkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga sekedar menggambarkan fakta yang terjadi dalam fenomena Golput dalam Pemilihan Legislatif DPRD.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian dari responden maka dapat diketahui bahwa secara teknis responden yang tidak memberikan suaranya pada Pemilihan Legislatif tahun 2019, Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan masyarakat di desa Umbu Riri tidak menggunakan hak pilihnya/golput, yakni dari segi faktor administrasi. sebagian besar disebabkan oleh adanya kegiatan lain yang dinilai lebih urgen oleh responden, yang pelaksanaannya bersamaan pemungutan suara, sehingga dirinya tidak memberikan suaranya. Kegiatan lain tersebut menurut sebagian besar responden merupakan usaha dasar, di mana apabila dirinya meninggalkannya, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi keluarga. Hal ini bisa dimengerti karena umumnya responden bekerja sebagai pedagang sehingga menuntut kesehariannya untuk aktif mengerjakan pekerjaannya.

Fenomena di atas pada pemilihan legislatif di Desa Umbu Riri tingkat partisipasi yang rendah, desa Umbu Riri juga merupakan desa yang menduduki peringkat pertama yang partisipasinya sangat kurang di bandingkan dengan Desa lain. Desa Umbu Riri ini memiliki beragam latar belakang penduduk diantaranya bertani, pedagang dengan daerah perdagangan, serta kurangnya pendidikan sehingga partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karna tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan, kemudian di anggap pemimpin terpilih akan kurang tanggap atas aspirasi masyarakat dari pemimpin yang terpilih.

Golput pada dasarnya juga merupakan identitas politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat bila dilakukan atas dasar kesadaran politik yang tinggi. Individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai- partai politik tertentu. Berikut tabel di bawah ini merupakan perolehan suara pada TPS berdasarkan jumlah yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan jumlah yang menggunakan Hak Pilih.

Pembahasan

Dalam Kamus Politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun, 2013;363). Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Akbar Kaelola, 2009;222).

Partisipasi politik merupakan suatu aktifitas tentu di pengaruhi oleh beberapa faktor Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang di maksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban negara. Misalnya, hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sangat penting untuk masyarakat ikut turut berpartisipasi dalam kegiatan politik sehingga dapat menyuarakan pilihan yang menurut kita bisa untuk menjadi pemimpin.

Secara umum terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan kehadiran pemilih tidak hadir dalam suatu pemilu, pendekatan pertama menekankan pada karakteristik sosial dan psikologi pemilih dan karakteristik Istitusional sistem pemilu sementara itu pendekatan kedua menekankan harapan pemilih tentang kekurangan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir memilih. Dapat disimpulkan, pilihan untuk golput secara konstitusioanl memang tidak memiliki konsekuensi moral di dalam komunikasi masyarakat tertentu.

Golput pada dasarnya juga merupakan identitas politik untuk menyuarakan aspirasi rakyat bila dilakukan atas dasar kesadaran politik yang tinggi. Individu memandang aktivitas politik merupakan ancaman terhadap beberapa aspek kehidupannya. Ia beranggapan bahwa mengikuti kegiatan politik dapat merusak hubungan sosial dengan lawannya dan dengan pekerjaannya karena kedekatannya dengan partai- partai politik tertentu.

Artinya tingkat golput di Desa Umbu Riri ini sangatlah tinggi di bandingkan dengan desa yang lain di mana faktor penyebabnya di antaranya adanya, agenda lain pada hari pencoblosan yang tidak bisa di hindari bagi masyarakat sehingga mereka tidak dapat ikut untuk memilih pada saat pemilihan. Di Desa Umbu Riri juga memiliki 3 sifat yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya diantaranya:

Sifat Apatis adalah ini lebih ke manifestasi kepribadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat tertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat atau kepuasan sehingga mereka tidak mempunyai minat terhadap politik. Berdasarkan hasil wawancara di atas masyarakat Umbu Riri sebagian besar tidak memilih atau golput di karenakan sedang pergi merantau dan juga bagi mereka pemilu tidaklah penting dalam hidup mereka. Lebih baik bekerja dari pada pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sifat Alienasi adalah bentuk perasaan pada seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu kegiatan tertentu yang tidak sesuai dengan keinginan serta harapannya sehingga memicu adanya ketidakseriusan dalam menjalankan suatu aktifitas. Berdasarkan hasil wawancara bahwa perilaku pemilih masyarakat Desa Umbu Riri sendiri dilihat dari pendapatan yang di mana bekerja lebih baik ketimbang memilih karna pekerjaan sudah menjadi pendapatan yang pasti, jika mereka tidak bekerja sehari maka esoknya kebutuhan tidak terpenuhi.

Sifat Anomi adalah keadaan ketidakpastian atau kekacauan dalam suatu masyarakat yang terjadi terhadap norma-norma sosial tidak lagi memberikan arahan atau panduan yang jelas bagi individu dalam masyarakat tersebut. Golput merupakan hak setiap warga negara, namun sebagai warga negara yang baik kita harus mempunyai kesadaran hukum untuk

menjalankan hak kita dengan ikut berpartisipasi dalam proses pemilu demi terciptanya kemaslahatan umat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam proses politik yang bertujuan untuk membangun negara, maka akan semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang untuk berperilaku tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan legislatif Tahun 2019. Adanya perilaku golput selain faktor teknis, faktor politis dan faktor ideologis juga adanya faktor identitas yang berpengaruh pada ketiga faktor teknis, politis, dan ideologis sehingga berpengaruh pada perilaku golput di masyarakat desa Umbu Riri. Faktor identitas yang mana berpengaruh dalam perilaku golput seseorang yang berasal dari faktor-faktor sebagai berikut:

Faktor internal yang di maksud adalah dimana masyarakat pada saat pemilihan tidak menggunakan hak pilih di karenakan akibat alasan-alasan politik seperti ketidakpuasan terhadap pemilu dan dilihat dari segi pekerjaan, di mana sebagian besar masyarakat desa Umbu Riri bekerja sebagai pedagang, berladang, dan Merantau sehingga mereka lebih mementingkan bekerja untuk menghidupi kehidupan sehari-hari di bandingkan ikut memilih dalam pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa golput yang terjadi di Desa Umbu Riri dengan tingkat pendidikan dan status ekonomi yang rendah tidak menggunakan hak pilihnya di karenakan kebutuhan mereka yang sangat mendesak membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja dari pada datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Faktor eksternal penyebab golput yang di maksud disini meliputi kesalahan-kesalahan teknis dari petugas KPU, PPK KPPS, seperti masih banyak masyarakat yang tidak terdaftar atau terdaftar ganda, selanjutnya adanya warga yang sudah tidak berada di daerah tersebut tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (TPS).

Selain kendala teknis dari KPU penyebab lain yang menyebabkan golput karena faktor eksternal adalah adanya para penganut ideologi atau paham-pqham tertentu yang bertantangan dengan kondisi serta sistem pemilu yang ada saat ini, sehingga mereka tidak ingin menggunakan hak pilih mereka tidak ikut partisipasi dalam pemilihan atau TPS yang berada jauh dari wilayah tempat tinggal masyarakat yang bersangkutan serta karena kendala teknis pada saat pemilihan masyarakat mengalami keadaan tidak sehat (Sakit), dan juga masyarakat yang sedang berada di luar daerah mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hasil wawancara diatas di mana pada saat pemilihan tidak hadir, karena kesalahan teknis seperti keadaan sakit pada hari pencoblosan sehingga tidak mendatangi ke tempat pemungutan suara dan juga tempat pemungutan suara jauh.

Pelaksanaan pileg merupakan indikator paling mudah untuk menentukan sebuah negara yang menganut asas demokrasi atau tidak. Karena pemilu adalah proses masyarakat dalam menentukan perkembangan sebuah negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu. Karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat mempengaruhi terwujudnya good goverment dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pileg secara langsung juga memicu sikap masyarakat untuk tidak memilih (GOLPUT) yang merupakan sifat politik.

Terhadap tingginya angka golput, responden menanggapi dengan pandangan yang bervariasi. Sebagian besar menyatakan kekecewaan dan menganggap sebagai ketidakpercayaan masyarakat terhadap kandidat dan pemerintah, sebagian lainnya menganggap hal ini sebagai kesalahan teknis sehingga tidak hadir pada saat pemilihan dan kesalahan manajemen kepemiluan seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah. sedangkan sebagian lainnya menganggap sebagai hal yang normal. Gejala yang tampak di masyarakat Desa Umbu Riri, ketika dilakukan wawancara dengan beberapa responden adalah adanya melatarbelakangi seseorang untuk berperilaku golput, dari hasil penelitian pada masyarakat Desa Umbu Riri sebagian besar sedang merantau, dan adanya

halangan teknis seperti sedang mengalami sakit, kesehatan mental, dan juga sedang berada di luar pada saat pemilihan. sehingga masyarakat Desa Umbu Riri tidak menggunakan hak pilih mereka (GOLPUT).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Fenomena Golput terhadap Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Sumba Tengah tahun 2019 di Desa Umbu Riri memiliki sifat Anomi, sifat Apatisme dan sifat Alienasi yang di mana masyarakat yang mementingkan kebutuhan sehari-hari di bandingkan ikut memilih dalam pemilu dan juga tidak mau terlibat dalam kegiatan politik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat berperilaku golput adalah faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal meliputi faktor sosial ekonomi yang sangat mempengaruhi masyarakat Desa Umbu Riri untuk berperilaku golput dalam pemilihan legislatif 2019. faktor sosial ekonomi ini merupakan alasan yang paling dominan dalam mempengaruhi pemilih sehingga tidak hadir di tempat pemungutan suara. Masyarakat yang golput merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka menganggap bahwa pemilu hanya suatu kegiatan yang tidak berarti dan mereka lebih mengutamakan kebutuhan hidup mereka dari pada hadir ke tempat pemungutan suara.

Faktor eksternal yang terdiri dari kendala teknis seperti pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pencoblosan karena keadaan sakit, sehingga tidak menggunakan hak pilihnya. Ada juga kendala pekerjaan di mana pada saat hari pemilihan berada dalam pekerjaan yang rutinitasnya yang tidak bisa pemilih tinggalkan karena merupakan rencana keluarga dan yang mendukung ekonomi keluarga.

Faktanya pada masyarakat desa Umbu Riri di mana masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, pedagang di mana pekerjaannya harus dilakukan dalam keseharian dan tidak bisa di tinggalkan, sehingga walaupun dirinya mengetahui kapan waktunya melakukan pemberian suara di TPS, namun karena urgennya pekerjaan baginya dan keluarga, maka dengan terpaksa pilihan untuk berperilaku golput menjadi alternatif utama.

Daftar Pustaka

- Asrinaldi. 2012. *Politik Masyarakat Miksin Kota*. Yogyakarta: Gava Media.
- Budiardjo, Miriam. 2008:371. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Efriza dan Yoyoh Rohaniah. 2015. *Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publisng.
- Efriza. 2012 *POLITICAL EXPLORE Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung:ALFABATE.
- Kaelola, Akbar.2009. *Kamus Istila Politik Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala
- Marbun, B.N. 2013.*Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Graha Persada
- Raga Maran, Rafael. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman H, A. 2007. *Sistem politik Indonesia*.Yogyakarta: Gratha Ilmu.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rinjani, Rahman. 2014 :6-13. studi tentang golongan putih dalam pilkada gubernur Kaltim 2013 di kecamatan Muara.

TATA KELOLA OBJEK TAMAN WISATA KULINER DI PANTAI KELAPA LIMA KOTA KUPANG

MANAGEMENT OF CULINARY TOURISM PARK OBJECTS AT KELAPA LIMA BEACH KUPANG CITY

Maria Imelda Soba ^{1*}, Ananias Riyoan Philips Jacob², Alfridus S.D. Dari³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: mariasoba796@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the governance of culinary tourism park objects on Kelapa Lima Beach, and determine the supporting and inhibiting factors in the management of culinary tourism objects in Kelapa Lima Beach Kupang City. This study uses the theory of George Terry with 4 aspects, namely planning, organizing, movement, and supervision. The method used is a qualitative method with purposive sampling techniques. The results of this study explain how the planning carried out by the Ministry of PUPR and the Kupang City Government already has a basis, with the aim of improving the tourism sector and improving the economy of fish traders and fishermen. Government organizing already has a basis for organization related to departmentalization and division of labor, but the organizational structure still does not exist. Some related agencies also did not want to provide answers related to the duties and authorities given. The movement in the management of the culinary park has not been followed up by the government, because the documents for the management of the place are still used as reference material, but for now there have been several tourism events carried out at the culinary park. Supervision is temporarily carried out by the Fisheries Office where the focus is on fish traders and fishermen, the Transportation Office to regulate parking attendants and Civil Service Police for security around the culinary park.

Keyword: Government, Sights, Governance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola objek taman wisata kuliner di pantai kelapa lima, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan objek wisata kuliner di Pantai Kelapa Lima Kota Kupang. Studi ini menggunakan teori dari George Terry dengan 4 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Kupang sudah mempunyai dasar, dengan tujuan meningkatkan sektor pariwisata dan meningkatkan perekonomian pedagang ikan dan juga nelayan. Pengorganisasian yang dilakukan pemerintah sudah mempunyai dasar untuk organisasi berkaitan dengan departementalisasi dan pembagian kerja, akan tetapi dalam struktur organisasi masih belum ada. Beberapa dinas terkait pun belum mau memberikan jawaban terkait dengan tugas dan wewenang yang diberikan. Pergerakan dalam pengelolaan taman kuliner tersebut masih belum ditindak lanjuti oleh pemerintah, dikarenakan dokumen untuk pengelolaan tempat tersebut masih dijadikan bahan rujukan, namun untuk sekarang sudah ada beberapa event-event pariwisata yang dilakukan di taman kuliner tersebut. Pengawasan untuk sementara dilakukan oleh Dinas Perikanan yang dimana fokusnya adalah pedagang ikan dan nelayan, Dinas perhubungan untuk menertibkan juru parkir dan Polisi Pamong Praja untuk keamanan sekitar taman kuliner.

Kata kunci: Pemerintahan, Tata Kelola, Objek wisata

Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan objek taman wisata kuliner di pantai kelapa lima kota kupang. Perlu adanya perhatian dari pemerintah kota untuk penataan kawasan objek taman wisata kuliner di pantai kelapa lima. Kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi, jantung perjuangan modal dan kelas sosial. Dinamika perkembangan kota tidak hanya dipahami sebagai problem internal kota, akan tetapi sebagai problem yang memiliki dimensi yang lebih luas dan kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik secara nasional dan global. Masalah tata ruang dan tata kelola ruang adalah bagian yang serius dari masalah perkotaan karena ada kekuatan modal global dan lokal yang sangat kuat dan dibutuhkan untuk membangun pusat-pusat perkotaan atau ikon-ikon kota. Kota Kupang adalah ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai ibukota provinsi pastinya

Kota Kupang merupakan kawasan strategis dalam kontestasi kepentingan ekonomi politik nasional, regional, dan global. Dalam konteks regional maupun nasional, saat ini Kota Kupang menjadi fokus pengembangan wilayah. Hal ini termasuk dalam kebijakan tata ruang wilayah nasional yang membuat Kota Kupang menjadi salah satu pusat kegiatan nasional di kawasan timur Indonesia. Kota kupang bukan hanya kawasan strategis provinsi tetapi juga salah satu kawasan dengan pertumbuhan dan perkembangan tercepat yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan transformasi sosial ekonomi masyarakat yang disusul oleh masifnya dinamika pembangunan infrastruktur. Rencana penataan wilayah pesisir pantai Kelapa Lima telah bermula sejak tahun 2014 lalu, namun Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) tidak menyetujuinya.

Mantan Walikota Kupang pada masa itu Jonas Salean, membenarkan bahwa rencana penataan wilayah pantai kelapa lima telah ada sejak tahun 2014. Desain bangunan yang sudah tersedia tidak sesuai dengan reklamasi 100 meter untuk wilayah kuliner karena desain maupun reklamasi tersebut diperuntukkan bagi nelayan agar wilayah jualan ikan lebih luas. Ruang untuk pengelolaan sampah dan limbah juga menjadi dasar dari rencana reklamasi dengan ukuran minimal 50 meter. Reklamasi dilakukan untuk mendapatkan ruang yang mencukupi bagi para pedagang sebagaimana pembangunan yang sama di Labuan Bajo sekarang ini. Namun BBKSDA tidak merestui rencana itu karena area itu bukan untuk reklamasi. Menurut mantan walikota Kupang Jonas Salean pada masa itu, penataan wilayah tata ruang kota tidak masalah selama tidak mengambil 85% wilayah seperti Kelapa Resto sekarang. Beralihnya jabatan Walikota Kupang kepada Jefri Riwo Kore tiga tahun setelahnya, penataan kawasan pesisir Teluk Kupang terutama Pantai Kelapa Lima dan Pantai LLBK (Lai-Lai Besi Koepan) juga disasar.

Pada tanggal 26 Juni 2021 dilangsungkan penandatanganan kerjasama antara Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Kupang dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang berwenang atas Teluk Kupang, yaitu kerja sama persyaratan pengeluaran izin pengecualian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) pada kawasan itu. Analisis dampak lingkungan sendiri bertujuan sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah, membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibuat. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp.81 Milyar oleh pemerintah pusat untuk penataan 3 (tiga) lokasi yakni Kota Lama Kupang, Pantai LLBK, Pantai kelapa Lima dan koridor 3 Jalan Frans Seda. Penandatanganan itu dilakukan di Palacio Ballroom hotel Aston Kupang yang dimana pengerjaannya telah dimulai pada tahun 2020 sebelum seremonial hitam di atas putih itu dilaksanakan pada pertengahan tahun 2021. Objek wisata kuliner di pantai Kelapa Lima Kota Kupang telah di resmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Selasa, 11 Oktober 2022 guna mendukung pembangunan sektor wisata di Kota Kupang. Berlokasi di tepi pantai, kawasan wisata kuliner

ini cocok bagi para wisatawan yang ingin menyantap hidangan sembari menikmati pemandangan pantai Kelapa Lima. Akan tetapi pengelolaan tempat wisata kuliner tersebut nampaknya belum dikelola secara baik dan akan menimbulkan banyak permasalahan.

Ada beberapa permasalahan yang perlu ditinjau kembali seperti penataan parkir dan juga masyarakat yang berjualan di sekitaran taman wisata tersebut, kemudian bagaimana pemindahan masyarakat yang aslinya adalah penjual ikan pada tempat tersebut yang direlokasi ke wilayah Pasir Panjang, bahkan para pedagang juga membuat lapak-lapak dan tempat panggang ikan baru yang ditempatkan di dekat Gazebo.

Selain itu, fasilitas seperti lampu penerangan juga mulai rusak, lantai Gazebo juga digenangi air. Lapak-lapak ikan tersebut tampak mengganggu keindahan area wisata kuliner yang dibangun dengan anggaran Rp.52 miliar tersebut. Dari permasalahan di atas, apabila dikaitkan dengan perencanaan dari Kementerian PUPR tentang penataan/pengelolaan objek taman wisata kuliner di pantai Kelapa Lima, dampaknya terdapat indikasi ketidaksesuaiannya dengan yang direncanakan. Implementasi yang terjadi adalah objek taman wisata kuliner tersebut dijadikan tempat penjualan ikan. Sebelum pembangunan tempat objek wisata taman kuliner dibangun, pemerintah setempat dampaknya juga tidak melakukan diskusi awal yang intensif dengan para pedagang sehingga ada beberapa pedagang yang sama sekali merasa keberatan dan tidak menyetujui adanya pembangunan tempat tersebut. Pemerintah Kota Kupang juga tidak sepakat dengan wacana pengelolaan tempat tersebut diberikan kepada Asosiasi atau pihak ke-3 karena jika diserahkan pada Asosiasi Penjual Ikan dan kuliner, maka akan terjadi permasalahan internal dan bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Metode

Penulis menjelaskan secara terperinci bukan hanya jenis penelitian tetapi juga desain penelitian baik desain penelitian kuantitatif maupun desain penelitian kualitatif. Selanjutnya diuraikan juga lokasi dan waktu spesifik pengambilan data/pengukuran variabel penelitian dilakukan. Bagian-bagian selanjutnya yang perlu dideskripsikan adalah variabel-variabel penelitian (*penelitian kuantitatif: independen dan dependen; penelitian kualitatif: area/fokus penelitian*), definisi (*penelitian kuantitatif: definisi operasional dan kriteria objektif; penelitian kualitatif: definisi istilah/konsep*), jumlah populasi dan besar sampel (*penelitian kualitatif: subjek penelitian/informan*), teknik pengambilan sampel, cara pengambilan data, pengolahan dan teknik statistik (kuantitatif) dan teknik non statistik (kualitatif) yang digunakan dalam proses analisis data. Sertakan juga teknik-teknik yang digunakan untuk menjamin *validitas* dan *reliabilitas* pengukuran variabel baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Hindari menuliskan definisi secara teoritis dengan menggunakan referensi pada bagian ini. Penjelasan tentang variabel dan instrumen serta cara pengukurannya.

Hasil

Pengelolaan Taman Wisata Kuliner di Kota Kupang sejauh ini belum ada titik terangnya. Tempat yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada April 2022 itu hingga kini seolah tidak bertujuan. Pengelolaan kawasan tersebut masih mengambang karena belum ada penyerahan resmi dari Kementerian PUPR. Pemerintahan Kota Kupang mulai menertibkan para pedagang ikan di kawasan wisata Pantai Kelapa Lima. Hingga saat ini bangunan tersebut belum secara resmi diserahkan oleh Kementerian PUPR ke Pemerintah Kota Kupang. Pemerintah Kota Kupang mulai bertugas melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban di lokasi Objek Taman Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima Kota Kupang. Penertiban ini sebagai tindak lanjut dari pengelolaan sementara yang diberikan BPPW terhadap Pemerintah Kota Kupang.

Sebelum terjadinya penertiban, sudah ada pendekatan Pemerintah Kota Kupang bersama pedagang sehingga tidak terjadinya penolakan warga saat penertiban. Dinas Perhubungan juga telah menertibkan para juru parkir, sehingga parkir tidak diperbolehkan berada di atas atau area taman melainkan di arahkan ke area jogging track (di belakang Hotel On The Rock).

Pembahasan

Perencanaan berhubungan erat dengan manajemen. Suatu rencana pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang ditentukan sebelum melakukan berbagai kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Perencanaan juga dapat dikatakan tindakan yang menyeluruh yang berusaha mengoptimalkan dana dari suatu sistem. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Kota Kupang tengah bersolek. Hampir di setiap sudut kota tampak ada pembangunan. Beberapa diantaranya adalah kegiatan Penataan Kawasan Kota Kupang oleh Kementerian PUPR. Penataan kawasan Kota Kupang dikerjakan secara bertahap dengan meningkatkan kualitas lingkungan kawasan pariwisata yang lebih baik, sekaligus mendorong pengembangan destinasi wisata bahari kebanggaan masyarakat Kota Kupang. Kegiatan penataan kawasan Kota Kupang tahap 1, Direktorat Jendral Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) mewujudkan komitmen dan dukungan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah hingga tercipta ruang Kota Kupang yang lebih baik dan berkualitas. Kawasan Kelapa Lima merupakan sentra penjualan ikan bagi masyarakat setempat dan secara eksisting telah memiliki promenade(jalan-jalan).

Skenario penataan kawasan dengan menata PKL dan mengembalikan View ke arah pantai serta memaksimalkan ruang terbuka publik. Menurut George Terry perencanaan adalah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Tujuan pembangunan taman kuliner di Pantai Kelapa Lima yang diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu adalah meningkatkan sektor pariwisata di Kota Kupang, dan meningkatkan perekonomian pedagang-pedagang ikan dan nelayan. Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Kupang sudah menerapkan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan menurut teori tersebut. Dinas Pariwisata Kota Kupang siap mengelola dan menghadirkan beberapa event-event pariwisata seperti Pesparani, malam minggu asyik dan APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Akan tetapi masih ada yang kurang maksimal, dalam hal ini adalah pengelolaan yang belum baik dan sesuai. Diharapkan agar pihak pemerintah dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada sehingga apa yang direncanakan dapat kembali terlaksanakan.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi adalah departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh suatu bagan organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Pemerintah Kota Kupang sudah punya dasar untuk sebuah organisasi berkaitan dengan departementalisasi dan pembagian kerja, akan tetapi dalam struktur organisasi masih belum ada sebagaimana yang dikatakan oleh Terry. Struktur organisasi dapat

didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi. Dari aspek pengorganisasian, pengelolaan untuk sementara dilakukan oleh Dinas Perikanan Dan Kelautan dan Pol PP yang dimana mempunyai wewenang untuk para pedagang ikan, dan juga menjaga ketertiban yang ada di kawasan taman tersebut. Adapun beberapa dinas-dinas yang terkait masih belum memberikan jawaban terkait dengan tugas dan wewenang yang diberikan dikarenakan belum adanya tindak lanjut dari koordinator Asisten 2 Walikota Kupang.

Pergerakan (Actuating) merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota dalam sebuah kelompok kerja, sehingga mereka memiliki keinginan dan usaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi yang bersangkutan serta sasaran-sasaran yang diinginkan anggota-anggota dalam organisasi tersebut. Hal mendasar dalam pergerakan adalah manajemen yang berpandangan progresif, maksudnya para manajer harus menunjukkan sikap teladan dan keputusan-keputusan mereka bahwa mereka mempunyai perhatian terhadap anggota-anggota yang ada di dalam suatu lembaga. Dalam hal ini pergerakan lebih ditujukan tentang bagaimana seorang pimpinan lembaga atau manajer bisa menggerakkan kepengurusannya untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Menurut George Terry pergerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Untuk mencapai kesuksesan dalam pergerakan seseorang harus senantiasa berpikir objektif dalam setiap mengambil sikap, pergerakan kali ini belum sesuai dengan yang dikatakan Terry. Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa untuk pergerakan atau pelaksanaan dalam pengelolaan Objek Taman Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima masih belum jelas, dikarenakan dokumen untuk pengelolaan tempat tersebut masih dijadikan bahan rujukan, pemerintah masih belum menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai dengan perencanaan. Pihak pemerintah baru hanya melakukan beberapa event-event pariwisata. Diharapkan untuk langkah selanjutnya, Pemerintah Kota Kupang bisa melakukan upaya yang lebih baik dalam hal pengelolaan Objek Taman Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima agar bisa sesuai dengan yang direncanakan.

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan bisa lebih sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Karena bagaimanapun juga dalam sebuah pengelolaan pasti ada kekeliruan maupun kegagalan-kegagalan serta petunjuk-petunjuk yang tidak efektif. Menurut George Terry pengawasan mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan melakukan evaluasi dari penyimpangan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan pengawasan Objek Wisata Kuliner di Pantai Kelapa Lima sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Terry. Pengawasan tersebut rupanya tidak terlepas dari campur tangan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang. Sebelum adanya pembangunan taman wisata tersebut, pihak pemerintah sudah melakukan kesepakatan bersama dengan para pedagang ikan yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Ikan Kota Kupang (APIK). Setelah mantan Walikota Jefry Riwo Kore melepas masa jabatannya, banyak permasalahan yang mulai timbul. Salah satunya pengelolaan wisata kuliner di Pantai Kelapa Lima. Hal ini terlihat ketika Dinas tersebut terkesan membiarkan pedagang lain berjualan di luar lokasi, sedangkan mereka telah bersepakat untuk berjualan di lapak yang sudah tersedia. Selain itu, Dinas Perikanan Dan

Kelautan Kota Kupang telah menolak APIK agar tidak terlibat, sementara APIK sudah berperan mulai dari mengusulkan lokasi itu untuk dibangun. Adapun APIK ikut terlibat dalam diskusi-diskusi rencana pembangunan wisata, karena APIK yang beranggotakan pedagang dan nelayan Kelapa Lima bakal dijadikan penggerak wisata kuliner nantinya. Pengawasan dari Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan, sudah melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang timbul. Dalam penertiban tersebut, semua pedagang membongkar lapak yang dipasang di area taman, lebih tepatnya di luar gazebo yang awalnya sudah ditetapkan sebagai area pedagang. Para pedagang ikan dan kuliner tersebut dipindahkan kembali ke tempat yang sudah disediakan. Dinas perhubungan bertugas untuk menertibkan para juru parkir sehingga parkir tidak diperbolehkan berada di atas atau di area taman.

Kesimpulan

Salah satu bukti perhatian pemerintah kepada masyarakat Kota Kupang adalah dengan dibangunnya kawasan wisata Kelapa Lima guna mendukung sektor pariwisata. Hal ini menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan taman wisata dikarenakan masyarakat bisa ikut bergabung dalam perayaan event-event wisata seperti etnis budaya dan bisa menjadi lokasi hiburan bagi masyarakat Kota Kupang. Belum semua pedagang ikan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner, dikarenakan kerja sama antara pemerintah dengan pedagang ikan yang awalnya sudah disetujui namun setelah itu pemerintah melakukan penolakan terhadap pedagang ikan agar tidak ikut dalam pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner tersebut. Komunikasi sangatlah penting dalam sebuah kerja sama; dalam hal ini komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dengan pedagang ikan masih sangat kurang baik yang mengakibatkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner. Pihak pemerintah sampai sekarang belum mau memberikan tanggapan terkait dengan pengelolaan objek Taman Wisata Kuliner.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang baik bagi individu atau kelompok. Belum ada pertanggungjawaban dari pihak pemerintah sama sekali. Pengelolaan kawasan ini masih mengambang karena terkait dengan surat penyerahan resmi. Pada awalnya pengelolaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang, PD pasar pernah melakukan pembersihan namun akhirnya tidak lagi melakukan pengelolaan karena adanya tarik ulur di Pemkot Kupang perihal pengelolaan. Transparansi merupakan aspek dasar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dimana hal tersebut dapat dilakukan melalui penerapan keterbukaan dan kemudahan akses serta melibatkan para pedagang ikan dan nelayan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah. Sampai sekarang belum ada keterbukaan dari pihak pemerintah terkait pengelolaan objek taman wisata kuliner tersebut terhadap masyarakat (APIK). Kesepakatan sebelumnya adalah APIK harus dilibatkan dalam pengelolaan kawasan tersebut, namun pada akhirnya APIK tidak dilibatkan. Komisi II DPRD Kota Kupang meminta agar Pemkot segera memiliki perencanaan terkait pemanfaatan kawasan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar saat dilakukan serah terima maka pengelolaan kawasan tersebut tidak menjadi kisruh antara pemerintah dan masyarakat. Komisi II DPRD juga meminta kepada masyarakat agar bersabar menunggu sampai segala proses penyerahan aset selesai.

Daftar Pustaka

- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta
Afrizal. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta Rajawali Pers

- Agus Dwiyanto. (2008). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, cet. III. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Damanik, Janianton. (2012). Manajemen destinasi pariwisata: sebuah pengantar ringkas. Yogyakarta: Kepel Press
- Hakim, L. (2013). Problem Demokratisasi Dan Good Governance di Era Reformasi. Cetakan Pertama. Universitas Brawijaya. Malang
- Krina L.P.L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. (2007). Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kreasti
- Andini, R., M.J. Amin, dan L. Dyastri. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara. Jurnal Ilmu Pemerintahan 5(4): 1571-1582
- Heryana, Toni, and Sari Kartika Dewi. (2013). "Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur." Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan
- Jayudi, A. (2015). Studi Pemanfaatan Ruang Objek Wisata Pantai Barane Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Junaid, Ilham dan Muh. Arfin M. Salim (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event, Volume 1, No.1. Politeknik Pariwisata Makassar
- Lutpi, Hakkiatul. (2016). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Di Kecamatan Jerowaru. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Maryam, N.S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi.
- Muhamad, N. (2020). Studi Tentang Penataan Dan Pengelolaan Wisata Pantai Gading Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekar Bela Kota Mataram (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).

Preferensi Politik Pemilih Pada Pemilu Kepala Daerah Timor Tengah Utara Tahun 2020

Voters' Political Preferences in the 2020 North Central Timor Regional Head Election

Esrah D.N.A Benu*, Frans Wilmat Muskanan²

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: esrah.benu@staf.undana.ac.id

Abstract

This research is a quantitative research using a survey method that aims to (1) find out what factors influence voter preferences for candidates for the Regional Head of North Central Timor in the 2020 regional elections (2) find out the preferences of traditional figures, religious figures and political party figures influence the choice of voters on candidates for Regional Head of the political party concerned (3) know the factors that can change voter choice against candidates for the Regional Head of North Central Timor in the 2020 regional elections. The results of the research conducted were found that; First, the political preferences of voters in North Timor Tenag district prioritize the experience of regent candidates because experience according to voters will be able to solve various socio-economic, political and legal problems in North Central Timor district, Second Voters strongly believe in traditional shops, religious shops and political shops in fighting for social life in North Central Timor district, Third But in the political aspect in terms of influencing voters to vote for certain candidates Not being a factor that greatly influences voters' political preferences in the North Central Timor Regency Regional Head Election, The four factors that can change voters' political preferences are the ability of regional head candidates to solve various social problems, the experience of regional head candidates in the government and the candidate's program and vision and mission.

Keywords: Voter Preferences, Politics, Elections

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey yang bertujuan untuk (1) mengetahui Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi preferensi pemilih terhadap calon Kepala Daerah Timor Tengah Utara pada Pilkada serentak tahun 2020 (2) mengetahui preferensi terhadap Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh partai politik berpengaruh terhadap pilihan pemilih pada calon Kepala Daerah dari partai politik yang bersangkutan (3) mengetahui Faktor yang dapat Merubah Pilihan Pemilih terhadap calon Kepala Daerah Timor Tengah Utara pada Pilkada serentak tahun 2020. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa; Pertama, Preferensi politik pemilih di kabupaten Timor Tenag Utara lebih mengedepankan pengalaman calon Bupati karena pengalaman menurut pemilih akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial ekonomi politik dan hukum di kabupaten Timor Tengah Utara, Kedua Pemilih sangat percaya terhadap toko adat, toko agama dan toko politik dalam memperjuangkan kehidupan sosial di kabupaten Timor Tengah Utara, Ketiga Namun dalam aspek politik dalam hal mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu tidak menjadi faktor yang sangat mempengaruhi preferensi politik pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten timor tengah utara, Keempat Faktor yang dapat merubah preferensi politik pemilih yaitu pada kemampuan calon kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, pengalaman calon kepala daerah di pemerintahan dan program serta visi misi calon.

Kata kunci: Preferensi Pemilih, Politik, Pemilihan Umum

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan bentuk demokratisasi yang harus dilakukan oleh setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara dalam rangka menegakkan dan mempertahankan demokrasi. Pada dasarnya tidak ada negara yang disebut demokrasi tanpa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Melalui pemilu memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Selain itu pemilu dapat dikatakan pula sebagai langkah awal untuk meningkatkan derajat dan pembenahan aspek-aspek demokrasi lewat konteks pemilu di Indonesia.

Prinsip pemilu adalah bagian dari proses kehidupan politik yang normal dalam negara yang demokratis. Sebagai bagian dari sarana demokrasi, pemilu diletakkan sebagai mekanisme untuk terciptanya pergantian kekuasaan politik secara wajar, stabil dan melembaga sesuai konstitusi. Sedangkan yang menjadi pelaku pemilu adalah semua warga negara yang secara sah ditetapkan oleh konstitusi. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Pemilih bebas menentukan kandidat manapun yang menjadi pilihannya. Dalam pemilu, warga negara dapat mengekspresikan hak suaranya baik berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki proses dan kualitas kehidupan demokrasi, pemilu kepala daerah patut mendapat dukungan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pilkada merupakan sebuah Event politik, instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan wacana bagi penguasa dan masyarakat untuk saling berinteraksi, sehingga yang dibahas dalam pemilu atau Pilkada adalah soal-soal mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan. Maka dalam konteks ini sangat jelas bahwa Pilkada bukanlah sekedar pesta pora demokrasi yang bersifat seremonial belaka pada tingkat lokal. Pilkada pada dasarnya memiliki fungsi yang beragam yaitu: memindahkan wewenang masyarakat kepada Elit, mediator antara rakyat dengan pemerintah, membatasi perilaku pemerintah dan mengontrol agenda Publik, sarana rotasi kekuasaan dan pengendalian konflik dengan cara memindahkan konflik dari tatanan masyarakat ke dalam tataran sistem.

Perilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Sebagai salah satu instrumen terpenting dalam Pilkada, Suara pemilih bukan saja sebagai faktor yang menentukan kemenangan calon kepala daerah tetapi juga sebagai tolok ukur keberhasilan sistem demokrasi dalam satu negara. Pemilih dengan menggunakan hak pilihnya dapat menentukan dengan hati nurani dan pemikiran jernih siapa tokoh-tokoh yang berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memperjuangkan aspirasinya. Partai politik dengan berbagai perangkat yang dimilikinya dapat menyeleksi siapa saja yang akan dicalonkan, tentunya dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh mekanisme internal partai sekaligus memberikan pendidikan politik kepada para anggotanya untuk mempersiapkan supaya siap dipilih dalam proses sirkulasi kepemimpinan baik di partai maupun di tataran jabatan politik.

Dalam Pemilukada langsung, berbagai kepentingan seperti kepentingan individu, partai, golongan, etnis, agama sering muncul dalam berbagai hajatan politik di tingkat lokal tersebut. Hal ini dimungkinkan karena ragam budaya dalam masyarakat yang majemuk, sering kali membentuk preferensi politik pemilih. Menurut teori Porteus dalam (Jalaluddin 2001:51) Preferensi adalah bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu atau Masyarakat dan komponen-komponen tersebut adalah Persepsi, sikap, nilai, kecenderungan dan kepuasan. Komponen tersebut saling memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Setiap individu menentukannya dalam memilih.

Mobilisasi masa untuk meningkatkan jumlah suara selalu terjadi pada masa pra Pemilu karena masyarakat dipengaruhi beberapa faktor dalam mengambil keputusan, khususnya dalam menentukan suara dalam pemilihan. Faktor utama yang mempengaruhi masyarakat tersebut diantaranya adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis sendiri adalah model paling awal dalam tradisi studi perilaku memilih. Model ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan. Seorang pemilih memilih partai atau kandidat dalam Pemilu karena adanya kesamaan antara karakteristik sosiologis pemilih dengan karakteristik sosiologis partai atau kandidat tersebut (Eriyanto, 2007). Selain model sosiologis tersebut, dalam studi perilaku pemilih ada model lain untuk menjelaskan masalah-masalah perilaku memilih yaitu model psikologis, dan model ekonomi-politik atau pilihan rasional (*rational choice theory*).

Model psikologis dimulai dari asumsi bahwa terbangun sebuah persepsi dan sikap partisan seseorang karena proses sosialisasi politik yang dialaminya. Partai politik, seperti halnya agama, kelas sosial, dll., adalah sebuah entitas independen yang akan membentuk sentimen dan identitas politik seseorang yang tersosialisasi ke dalam partai politik tersebut. Identitas partai politik (*Party ID*) ini yang memperantarai faktor-faktor sosiologis dengan opini dan sikap terhadap partai politik, calon-calon pejabat publik, isu-isu politik terkait, dan keputusan untuk memilih partai atau calon pejabat publik tertentu.

Model rasional dimulai dari sebuah keraguan bahwa isu-isu politik, citra partai dan calon, terutama bagaimana kinerja calon dan partai politik dipersepsikan, dipercaya bukan hanya masalah psikologis dan partisanship tapi merupakan pertimbangan rasional. Bagaimana seseorang memosisikan dirinya terhadap isu tertentu, dan bagaimana partai dan calon menyikapi isu-isu tersebut. Pertemuan antara posisi atau preferensi atas isu seorang pemilih dengan posisi atas isu yang sama dari calon atau partai politik menentukan perilaku memilih seseorang.

Dalam konteks pemilu, Pendekatan *rational choice* melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya soal ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi ini digunakan oleh pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih menjadi penguasa. Bagi pemilih untung rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih (Surbakti, 2010:85). Pada tahun 2020 kabupaten Timor Tengah Utara telah melaksanakan Pemilu serentak yang diikuti oleh tiga pasangan calon kepala daerah. Berikut nama-nama calon kepala daerah TTU yang bertarung dalam Pemilu serentak Timor Tengah Utara tahun 2020;

Ketiga calon kepala daerah tersebut datang dari berbagai latar belakang profesi, baik itu politisi dan birokrat. Latar belakang kandidat tentu kemudian mempengaruhi preferensi politik pemilih sehingga pilihan pemilih akan menjadi bervariasi berdasarkan faktor perilaku pemilih dalam meninjau dan menyeleksi setiap visi, misi dan program calon kepala daerah Timor Tengah Utara. Berikut latar belakang calon Bupati Timor Tengah Utara pada Pilkada tahun 2021

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian survei. Penelitian survei digunakan karena memberikan sebuah gambaran kuantitatif atau numeric dari bagian-bagian populasi (sampel) melalui proses pengumpulan data dengan menanyakan pertanyaan kepada orang. Data ini selanjutnya memungkinkan untuk menggeneralisasi temuan sampel terhadap populasi (Creswell, John W, 1994:117). Penelitian survei merupakan suatu penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau sistematis yang sama kepada

banyak orang, untuk kemudian seluruh jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. Pertanyaan terstruktur atau sistematis tersebut dikenal dengan istilah kuesioner (Prasetyo, Bambang, & Jannah, Lina Miftahul, 2008, 143).

Populasi dari survei ini adalah semua penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara yang sudah dewasa (berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah). Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan kata lain, Semua penduduk yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara ini dimasukkan sebagai populasi survei

Jumlah responden (sampel) dalam survei ini adalah sejumlah 440 responden. Responden tersebut terbagi secara proporsional 1 desa 10 hingga 20 responden dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, sehingga terdapat total 39 desa yang akan menjadi sample. Di masing-masing desa/kelurahan terpilih didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT), dan kemudian dipilih 5 RT secara random. Di masing-masing RT terpilih kemudian didaftar Kartu Keluarga (KK), dan dipilih 2 KK secara random. Di masing-masing KK terpilih, didaftar anggota KK yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni yang berumur 17 tahun atau lebih, atau yang telah menikah.

Metode pengambilan sampel yang diambil menggunakan teknik Multistage Random Sampling (MRS). Teknik pengambilan sampel ini diharapkan dapat menghasilkan sampel yang representatif dari populasi yang kompleks dan heterogen. Dengan penarikan sampel ini, diharapkan sampel yang didapat dapat menggambarkan keragaman masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap langsung (face to face interviews). Penelitian survei dengan metode wawancara tatap muka (face to face interview) memiliki keuntungan tersendiri yaitu antara lain tingkat pengembalian sangat tinggi, dimungkinkan membuat pertanyaan yang panjang dan kompleks karena pewawancara dapat melakukan probing, dapat menggunakan alat bantu visual, dan dapat mengamati perubahan perilaku (Prasetyo, Bambang, & Jannah, Lina Miftahul, 2008:153).

Analisa dan interpretasi adalah bagian akhir yang penting dalam sebuah penelitian. Tujuan analisa adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam proses penyederhanaan ini, digunakan statistik yang memang berfungsi untuk menyederhanakan data. Setelah data dianalisa dengan menggunakan statistik, hasil analisa tersebut akan diinterpretasi untuk mencari makna yang lebih luas dan implikasi dari hasil-hasil analisa tersebut.

Beberapa langkah analisa statistik yang relevan yang digunakan : Pertama, menggunakan tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini berguna untuk analisa satu variabel (univariate analysis) yang meliputi deskripsi ciri atau karakteristik variabel dan berguna untuk mempelajari distribusi dari variabel. Kedua, menggunakan tabel silang. Penyusunan tabel silang merupakan metode yang paling sederhana untuk mengamati hubungan antar dua variabel. Dalam tabel silang prosentase responden untuk setiap kelompok akan terlihat sehingga dapat membaca hubungan antar dua variabel. Ketiga, analisis data penelitian juga menggunakan beberapa metode statistik untuk mengetahui dan menguji hubungan antar variabel-variabel penelitian. Metode statistik tersebut adalah antara lain uji hubungan Contingency. Uji hubungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dua variabel yang diuji serta berapa nilai signifikansinya (Martono, Nanang, 2010:224).

Hasil

Responden penelitian ini berjumlah 440 orang. Yang terdiri dari 50 % responden laki-laki dan 50 % responden perempuan. Pengambilan responden perempuan dan laki-laki dilakukan secara sengaja sesuai dengan metodologi penarikan sampel yang digunakan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya

bahwa penelitian ini menggunakan metode multistage random sampling, yang merupakan gabungan metode stratifikasi dan cluster. Pengambilan responden laki-laki dan perempuan telah distratifikasi sebelumnya sehingga diperoleh angka 50 % laki-laki dan 50 % perempuan. Responden terbagi dalam dua wilayah/ kategori tempat tinggal yaitu desa dan kota. Sampel penelitian ini menunjukkan bahwa 90,9 % responden tinggal di wilayah yang berkategori desa, dan 9,1 % responden menempati wilayah yang berkategori kota.

Kategori Segmen	Sampel (n=440) (Oktober 2020)	DPT KPU 2019
	<i>Pedesaan-Perkotaan</i>	
<i>Desa</i>	90,9 %	91,2 %
<i>Kota</i>	9,1 %	8,8 %
	<i>Jenis Kelamin</i>	
<i>Laki-Laki</i>	50 %	49,5%
<i>Perempuan</i>	50 %	50,5%

Dari data sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibandingkan dengan data sensus BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kedua sumber data tersebut. Perbedaan kedua data masih dalam batas toleransi estimasi margin of error dari penelitian ini yaitu sebesar 4 %. Hal ini menguatkan bahwa metode penarikan sampel dan pengumpulan data sudah melalui prosedur yang benar dan tidak bias pada kelompok agama tertentu. Semua responden yang berumur 17 tahun ke atas yang merupakan populasi dari penelitian ini memiliki kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Dari kelompok umur, responden mayoritas berusia 20-29 tahun yakni 40,6%, 30-39 Tahun 29,5%, 40-49 tahun 15,4%. Responden juga terdiri dari mereka yang tergolong pemilih pemula atau dibawah 19 tahun yaitu sebanyak 7, 7 %. Dan usia diatas 50 tahun yakni sebanyak 6,8%.

Dari tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah mereka yang berpendidikan atas. Sebanyak 39,6 % responden adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan menengah atas atau sederajatnya. Dan sebanyak 32, 4 % adalah mereka yang pernah atau lulus sekolah menengah pertama (sederajatnya), serta 13,3% adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan diploma atau sarjana atau diatasnya. Hanya 17 % adalah mereka yang berpendidikan rendah. Yaitu sebanyak 2, 3 % adalah mereka yang tidak pernah sekolah dan 14,7% adalah mereka yang pernah atau lulus sekolah dasar. Dalam setiap pemilihan kepala daerah setiap pemilih dalam menentukan pilihannya terhadap pemimpin daerah yang di inginkannya kelak sangat beragam, dalam pemilihan kepala daerah Kab. Timor Tengah Utara, kira- kira Kapan Ibu/Bapak menentukan pilihan dalam pemilihan Bupati Timor Tengah Utara. Penelitian ini menukur waktu pemilih dalam memuntuskan pilihan politik pada Pilkada Timor Tengah utara. Waktu memutuskan pilihan sangat berpengaruh dengan preferensi politik, hasil temuan dapat dilihat pada grafik 4.4 dibawah ini

Pembahasan

Pertama Seberapa percayakah Ibu / Bapak terhadap tokoh adat/suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 85 % responden mengatakan sangat percaya/cukup percaya tokoh adat/suku dalam kehidupan manusia sedangkan 8,3 % mengatakan kurang percaya terhadap tokoh Agama dalam kehidupan manusia

dan 6,5 % tidak menjawab. Pada *bagian awal* pembahasan penulis harus menyajikan temuan utama/temuan penting penelitian yang menjawab tujuan penelitian pada bagian pendahuluan.

Untuk mengetahui pengaruh toko adat/suku dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih maka Dalam penelitian ini juga ditanyakan apabila toko Adat/suku mengarahkan pemilih untuk untuk memilih calon tertentu apakah akan ditaati sebagai bentuk kepercayaan terhadap tokoh tersebut. Dari hasil survei tersebut di temukan bahwa 7,8 % mengatakan bahwa akan mengikuti arahan dari toko adat, 72 % menjawab tidak akan mengikuti arahan tokoh adat/suku dan 17 % megatakan rahasia dan 3 % memilih untuk tidak menjawab. Kedua Seberapa percayakah Ibu / Bapak terhadap tokoh Agama yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya atau sangat tidak percaya sama sekali. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 83,9 % responden mengatakan sangat percaya/cukup percaya tokoh Agama dalam kehidupan manusia sedangkan 6,3 % mengatakan kurang percaya terhadap tokoh Agama dalam kehidupan manusia dan 9,8 % tidak menjawab.

Untuk mengetahui pengaruh toko adat/suku dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih maka Dalam penelitian ini juga ditanyakan apabila toko Adat/suku mengarahkan pemilih untuk untuk memilih calon tertentu apakah akan ditaati sebagai bentuk kepercayaan terhadap tokoh tersebut. Dari hasil survei tersebut di temukan bahwa 12,6 % mengatakan bahwa akan mengikuti arahan dari toko agama, 86,2 % menjawab tidak akan mengikuti arahan toko Agama dan 1.2 % megatakan rahasia. Untuk mengetahui pengaruh toko adat/suku dalam mempengaruhi pilihan politik pemilih maka Dalam penelitian ini juga ditanyakan apabila toko Adat/suku mengarahkan pemilih untuk untuk memilih calon tertentu apakah akan ditaati sebagai bentuk kepercayaan terhadap tokoh tersebut. Dari hasil survei tersebut di temukan bahwa 20,6 % mengatakan bahwa akan mengikuti arahan dari toko agama, 64,4 % menjawab tidak akan mengikuti arahan toko Agama dan 12 % megatakan rahasia.

Dalam kehidupan masyarakat Timor Tengah Utara faktor toko adat masih memberikan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, dimana masyarakat masih mempercayai toko non formal dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat, akan tetapi dalam urusan politik praktis toko adat/suku, Toko Agama dan Toko Partia Politik tidak selalu menjadi faktor determinan untuk mempengaruhi masyarakat pemih di Timor Tengah Utara, ini terlihat dalam hasil penelitian, dimana temukan bahwa masyarakat tidak akan terpengaruh oleh arahan toko adat, toko agama bahkan toko Partai Politik untuk memilih calon tertentu, ini dikarenakan preferensi politik pemilih lebih mempertimbangkan aspek lain seperti kemampuan calon kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan sosial, pengalaman, program kerja dan visi misi. Dalam setiap pemilihan kepala daerah setiap pemilih dalam menentukan pilihannya sebagai pemimpin daerah yang di inginkannya kelak sangat beragam, dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten. Timor Tengah Utara, Dalam penelitian ini, juga ditanyakan tentang faktor yang kemudian dapat merubah preferensi politik pemilih Preferensi politik pemilih. Argumentative yang rasional yang melekat pada para pemilih, seringkali menyebabkan perubahan dalam keputusan politik dan pilihan politik. Survey ini memperlihatkan bahwa ada kecendrungan perubahan pilihan politik dalam pilkada kabupupaten Timor Tengah Utara. Dari hasil penelitian di temukan bahwa. 74,5 % Visi Misi atau program dari kandidat dapat merubah pilihan pemilih, 6,7 % Himbauan dari Tokoh atau Kelompok tertentu dapat merubah pilihan pemilih, 3,1 % Pemberian Barang atau Uang dari salah satu kandidat dapat merubah pilihan pemilih, 15,7 % tidak menjawab.

Kesimpulan

Secara umum penelitian dengan menggunakan metode Survey ini menunjukkan bahwa pemilih di kabupaten Timor Tengah Utara yang dikategorikan sebagai pemilih rasional, Pada

satu sisi memang mampu mempertahankan rasionalitas politiknya. Dari penelitian yang dilakukan beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Preferensi politik pemilih di kabupaten Timor Tengah Utara lebih mengedepankan pengalaman calon Bupati karena pengalaman menurut pemilih akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan sosial ekonomi politik dan hukum di kabupaten Timor Tengah Utara
2. Pemilih sangat percaya terhadap toko adat, toko agama dan toko politik dalam memperjuangkan kehidupan sosial di kabupaten Timor Tengah Utara
3. Namun dalam aspek politik dalam hal mempengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu tidak menjadi faktor yang sangat mempengaruhi preferensi politik pemilih pada pemilihan kepala daerah kabupaten timor tengah utara
4. Faktor yang dapat merubah preferensi politik pemilih yaitu pada kemampuan calon kepala daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, pengalaman calon kepala daerah di pemeritahan dan program serta visi misi calon.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Jakarta: Rajawali Pres.
- Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI). 2009. Bagaimana Merancang dan Membuat Survei Opini Publik. Jakarta. AROPI.
- BPS Propinsi NTT, 2012, TTU Dalam Angka-2012, Badan Pusat Statistik Propinsi NTT
- Creswell, John W. 1994. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. London ; Sage Publications
- Kusnaldi, 2009, Memenangkan Pemilu Dengan Pemasaran Efektif, Bekasi Utara, Duta Media Tama
- Loy, A. A., & Jacob, A. R. P. (2020). Politik Identitas Pada Pemilukada Kabupaten Ende 2018: Studi Kasus Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah. Jurnal Politicon, 9(2), 11-16.
- Miriam Budiadjo, 2003, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Martono, Nanang. (2010). Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS. Yogyakarta: Gava Media.
- Sorensen, Georg. 2003. Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berkemhang. (ted.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Singarimbun, Masri., & Effendi, Sofian. (1984). Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Prasetyo, Bambang., & Jannah, Lina Miftahul, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Jalaluddin Rahmad, 2001 psikologi komunikasi, Edisi, Revolusi (Bandung : Remaja Rosdakarya
- Jacob, A. R. P. (2017). Preferensi Masyarakat Etnis Timor Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Kupang (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Jimly Asshiddiqie, 2010 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,
- Varma, S.P. 2007. Teori Politik Modern. (ted.). Jakarta: Rajawali Pres.

TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM DALAM DEMOKRASI LOKAL

**Studi Kasus Penolakan Proyek Geothermal Pltp Ulumbu Di Desa Lungar Kecamatan
Satar Mese Kabupaten Manggarai Tahun 2023**

NATURAL RESOURCE GOVERNANCE IN LOCAL DEMOCRACIES Case Study of Rejection of Ulumbu PLTP Geothermal Project in Lungar Village, Satar Mese District, Manggarai Regency in 2023

Marselinus Karno^{1*}, Rudi Rohi², Yohanes Jimmy Nami³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: mancekkarno@gmail.com

Abstract

This research was motivated by conflict over geothermal (geothermal) governance, in Poco Leok, Lungar Village, Satarmese District, Manggarai Regency. This study further seeks to explain how the conflict emerged from governance of geothermal resources in Poco Leok, Lungar Village. and why the Community Rejects the Development of Geothermal Projects in Ulumbu. Expanding the capacity of the Ulumbu 5-6 Geothermal Power Plant (PLTP) in Poco Leok, East Nusa Tenggara (NTT) is a strategic and important step . By utilizing clean and cheap energy sourced from geothermal, the development of the Ulumbu 5-6 PLTP in Poco Leok which is being worked on by PT PLN (Persero) through the Nusa Tenggara Main Development Unit (UIP Nusra) can reduce energy subsidies that must be provided by the government. research objectives This is to find out how the Pocoleok community rejected the Ulumbu PLTP geothermal project. Based on the problem formulation and in accordance with the objectives to be achieved in this research, the type of research used in this research is qualitative descriptive research. Data collection techniques were carried out using observation, interviews, documentation. The theory used in this research was conflict theory as the main theory put forward by Ralf Dahendorf, then strengthened by the Governmentality Theory put forward by Michael Foucault. Based on the results of research using interview methods with several respondents in Lungar Village, it was found that people who resisted by holding demonstrations at the Manggarai Regency Regent's office and the Manggarai Regency DPRD office by blocking the road when corporations and the government conducted land surveys and measurements. The reasons for the Pocoleok community, especially Lungar village, to refuse are as follows: the government has never approached the Pocoleok indigenous community since expanding drilling. people to plant various agricultural crops which results in loss of food space which ultimately leads to poverty. The lack of clean water is caused by geothermal mines which are greedy for water and the geothermal potential in the depths of the earth is forced out by emitting water and chemicals so that it is very dangerous for human health and the Pocoleok topography ecosystem. The condition of the land which always experiences landslides caused by the geothermal mining system at a relatively shallow depth from the extraction well. This has an impact on the health of the Pocoleok community who are attacked by ISPA (respiratory tract infection).

Keywords: Geothermal, Governance, Conflict.

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh konflik tata kelola panas bumi (geothermal), di Poco Leok Desa Lungar Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai. Studi ini lebih jauh ingin menjelaskan bagaimana konflik muncul dari tata kelola sumber daya panas bumi di Poco Leok Desa Lungar. dan mengapa Masyarakat Menolak Pembangunan Proyek Geothermal di Ulumbu. Perluasan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu 5-6 di PocoLeok,

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan langkah strategis dan penting. Lewat pemanfaatan energi bersih dan murah yang bersumber dari geothermal, pengembangan PLTP Ulumbu 5-6 di Poco Leok yang tengah digarap PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) dapat menekan subsidi energi yang harus disediakan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat pocoleok melakukan penolakan proyek geothermal PLTP Ulumbu. Berdasarkan rumusan masalah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sebagai teori utama yang dikemukakan oleh Ralf Dahendorf, kemudian dikuatkan oleh Teori Governmentality yang dikemukakan oleh Michael Foucault. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara terhadap beberapa responden di Desa Lungar ditemukan bahwa masyarakat yang melakukan penolakan dengan cara melakukan demonstrasi di kantor Bupati Kabupaten Manggarai dan kantor DPRD Kabupaten Manggarai dengan cara menghadang jalan ketika pihak korporat dan pemerintah melakukan survei dan pengukuran lahan. Adapun alasan dari masyarakat pocoleok khususnya Desa Lungar melakukan penolakan adalah sebagai berikut: pemerintah tidak pernah melakukan pendekatan dengan masyarakat adat pocoleok sejak melakukan perluan pengeboran, sejak pemerintah melakukan pengeboran PLTP Ulumbu pendapatan perekonomian masyarakat semakin menurun, karena lahan yang digunakan PLTP Ulumbu sebelumnya digunakan masyarakat untuk menanam berbagai tanaman pertanian hingga berdampak pada kehilangan ruang pangan yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan. Kekurangan air bersih yang diakibatkan tambang panas bumi yang rakus air dan potensi panas bumi yang berada di perut bumi dipaksa keluar dengan menyemburkan air dan zat kimia sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem topografi pocoleok. Kondisi tanah yang selalu mengalami klongsoran disebabkan oleh sistem tambang panas bumi pada kedalaman yang relatif dangkal dari sumur ekstraksi. Berpengaruh pada kesehatan masyarakat pocoleok yang diserang oleh penyakit ISPA (infeksi saluran pernapasan).

Kata kunci: Panas Bumi, Tata Kelola, Pemerintah.

Pendahuluan

Studi ini membahas tentang tata kelola sumber daya alam yang akan membahas tentang Konflik sosial. Konflik sumber daya alam dalam studi ini dilihat melalui tata kelola sumber daya panas bumi. Studi ini mengangkat konflik tata kelola panas bumi (geothermal), di Poco Leok Desa Lungar Kecamatan Satarmese Kabupaten Manggarai. Studi ini lebih jauh ingin menjelaskan bagaimana konflik muncul dari tata kelola sumber daya panas bumi di Poco Leok Desa Lungar dan mengapa Masyarakat Menolak Pembangunan Proyek Geothermal di Ulumbu dalam kasus Tata Kelola sumber Daya Panas Bumi ini. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi alam yang kaya. Kekayaan alam di Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dari sektor kehidupan yang ada disana. Dilihat dari pertanian, Perkebunan perikanan dan lain sebagainya. Beberapa sektor sudah sangat membantu perekonomian dan menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi terdapat juga beberapa sektor yang siap dikembangkan seperti: Sektor perkebunan, sektor kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri, sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi, serta sektor pariwisata dan salah satunya itu adalah pertambangan PLTP Ulumbu. Persoalan konflik tata kelola sumber daya panas bumi menjadi pusat perhatian peneliti. Fenomena ini menjadi lebih menarik karena bertolak belakang dengan studi-studi sebelumnya.

Studi-studi sebelumnya di benua Eropa, dominan menjelaskan bahwa konflik tata kelola panas bumi dipengaruhi oleh faktor minimnya informasi. Konflik tata kelola panas bumi di negara-negara maju cenderung dilihat dari segi penyampaian informasi. Sebaliknya di negara-negara berkembang melihat dampak langsung terhadap Masyarakat. temuan inidikuatkan oleh (Briitta Klagge, 2020) yang mengambil lokusnya di Kenya, Afrika Utara, dan (Nugraha, 2017) di Jawa Timur, Indonesia. Studi ini menemukan bahwa masyarakat masih menjadi fokus utama dalam melihat konflik tata kelola sumber daya panas bumi. Berangkat dari studi-studi sebelumnya ini, ada perbedaan bila melihat penelitian ini. Umumnya penelitian yang dilakukan beberapa negara lain, maupun daerah lain yang diteliti oleh para peneliti lebih kepada proses konflik yang berlangsung, tetapi aspek-aspek munculnya konflik dari tata kelola sumber daya panas bumi kurang diperhatikan atau difokuskan dalam penelitian mereka. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tata Kelola Sumber Daya Alam Demokrasi Lokal (Studi Kasus, Penolakan Proyek Geothermal PLTP Ulumbu di Desa Lungar Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai)”.

Studi ini dalam menjawab rumusan masalah diatas menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf, kemudian dikuatkan dengan Teori Governmentality dari Michael Foucault, Dalam setiap penelitian memerlukan landasan dan penjelasan untuk memecahkan masalah serta menyurutinya, untuk itu memerlukan landasan konseptual yang memuat pokok-pokok pemikiran yang menggambarkan dan menjelaskan sudut masalah yang akan disoroti. Dalam penelitian di Desa Lungar, peneliti berusaha menjelaskan fenomena konflik yang muncul dari tata kelola sumber daya geothermal melalui teori konflik dari Dahrendorf, kemudian dikuatkan oleh teori Governmentality dari Michel Foucault. Untuk melihat lebih lanjut aktor-aktor siapa saja yang terlibat didalam persoalan konflik tata kelola panas bumi di Pocoleok Desa Lungar peneliti menggunakan teori konflik dari Dahrendorf. Dimana menurut Dahrendorf bahwa pada gilirannya diferensiasi kepentingan melahirkan kelompok konflik potensial dan konflik aktual yang berbenturan karena memiliki kepentingan yang antagonistik (Garna, 1992, Veeger 1993). Selanjutnya Dahrendorf membedakan kelompok yang terlibat konflik atas tiga tipe yaitu

1. kelompok semu (Quasi grup), merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan
2. kelompok kepentingan (interest group) terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas.
3. kelompok konflik.

Adanya kelompok kelas di dalam sebuah masyarakat akan sangat berpotensi memicu terjadinya konflik. Perebutan dan juga upaya untuk mempertahankan status dan peran di dalam kelompok masyarakat kerap kali menimbulkan konflik. kemudian teori ini dikuatkan oleh teori Governmentality dari Michael Foucault. Konsep governmentality yang dipinjam peneliti dari Foucault ialah konsep kekuasaan yang melihat fenomena sosial masyarakat yang modern atau lebih ke dimodernisasi sehingga seperti yang dijelaskan Foucault ialah bahwa kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam atau berpusat pada suatu subjek atau lembaga melainkan tersebar hanya dalam setiap relasi sosial. Governmentality merupakan konsep kekuasaan pada masyarakat modern dan dipahami sebagai Disiplinary Power, dimana kekuasaan beroperasi terhadap tubuh untuk mengedepankan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (Vehicle Power), (Conin, 1996)

Metode

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik pokok yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancarawawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tata kelola sumber daya (penolakan geothermal\panas Bumi di Desa Lungar Kecamatan satar Mese, Kabupaten Manggarai).

Hasil

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil penelitian serta pembahasannya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kutipan wawancara dengan para informan, grafiik, serta tabel. Kutipan wawancara dengan para informan, grafik, serta tabel ditampilkan sesuai dengan sub pembaha san sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Dalam konteks konflik tata kelola panas bumi di Pocoleok Desa Lungar Tiga tipe kelompok yang dijelaskan Dahrendrof dalam kasus di Pocoleok Desa Lungar yaitu Kelompok semu(Pt Pln Persero Dan Pt Cogindo),k kelompok kepentingan (Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Manggarai),dan kelompok konflik (Masyarakat Pro dan Kontra dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai).Penyelesaian dinamika sosial dari konflik tata kelola panas bumi dalam studi ini hendak melihat apakah melalui negosiasi sebagai jalan untuk menahan terjadinya perpecahan atau justru dijadikan sebagai kontestasi oleh kelompok tertentu untuk mencapai kepentingan.Peneliti meminjam konsep ranah dari Bourdie.Dalam perspektif Bourdie, dunia sosial merupakan susunan ranah yang menjadi arena pertarungan antar individu atau kelompok untuk memperoleh pencapaian modal baik sosial, politik, maupun kultural, yang berujung pada penguasaan simbolik, (Ritzer dan Goodman, 2004).

Ada unsur kultural yang sangat kuat dalam mempengaruhi tata kelola sumber daya panas bumi di Poco leok Desa Lungar. Hal ini dtunjukkan dalam karakteristik masyarakat Desa Lungar, dimana umumnya tidak terlepas dari *mbaru gendang* (rumah adat), *natas* (halaman kampung), sebuah *pa'ang* (gerbang kampung) dan *compang* (altar kurban). Selain itu kearifan masyarakat Manggarai menyangkut harmonisasi antar manusia-alam-dunia adikodrati. Hal ini nampak dalam beberapa acara adat seperti *Penti* (perayaan syukur pasca-panen), yang melibatkan seluruh masyakat *beo* (kampung) dan bersama-sama mengantar *hang helang* (semacam sesajen) kepada roh leluhur dan dilakukan di *Mbaru Gendang* (rumah adat), (Regus, 2015). Dalam hubungan dengan relasi sosial, masyarakat Desa Lungar masih sangat komunal karena faktor budaya masih sangat kuat seperti dalam urusan pertanian, perkebunan, dan aktivitas sosial yang erat dengan budaya dan adat Manggarai. Masyarakat Desa Lungar masih sangat menghargai tata kelola lahan, Air, dan segala bentuk tatanan sosial masyarakatnya. Demikian pula dalam hubungan sosial politik, misalnya kontestasi pemilu, pilkada, pilkades, ataupun kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka masyarakat akan tetap mengedepankan unsur budaya seperti duduk melingkar secara bersama (*Lonto Leok*) dan bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama.

PLTP Ulumbu terletak di Desa Wewo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, beroperasi berdasarkan SK Dirjen Mineral dan Batu Bara Nomor 3042/23/DJB/2009 tertanggal 28 Oktober 2009. PLTP Ulumbu diresmikan pada November 2011 lalu, dan mulai beroperasi sejak Januari 2012. Bernaung di bawah PT PLN (Persero), PLTP Ulumbu beroperasi di lahan seluas 18.280 hektare. Terdapat empat pembangkit yang beroperasi, masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Lahan-lahan yang digunakan PLTP Ulumbu sebelumnya digunakan

warga untuk menanam berbagai tanaman pertanian dan perkebunan, mulai dari padi, jagung, umbi-umbian. Setelah dua puluh tahun beroperasi, warga di sekitar PLTP Ulumbu mengeluh kesehatannya terganggu, terutama terkait penyakit ISPA. Selain itu, tanaman pertanian dan perkebunan seperti kopi, cengkeh, kakao, hingga kemiri tak lagi produktif.

Perluasan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Ulumbu di Kabupaten Manggarai Pulau Flores Nusa Tenggara Timur, memasuki Wilayah Pocoléok. Upaya Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan itu kini berhadapan dengan penolakan warga yang hidup mereka akan rusak. Warga Desa Lungar menyampaikan kekhawatirannya akan kehadiran pembangkit baru di daerah mereka. Lungar merupakan satu dari tiga desa yang masuk wilayah Poco Leok. Dua desa lain adalah Mocok dan Golo Muntas. Tiga desa itu memiliki total 14 komunitas adat. Dalam proses pembangunan geothermal di Pocoléok desa Lungar, konflik yang terjadi saling terhubung antara satu sama lain dan saling mempengaruhi yang ditandai dengan adanya garis koordinasi untuk stakeholders yang menolak pembangunan PLTPB dan ditandai dengan adanya skema komunikasi yang bersifat konvergen (pendekatan). Sedangkan untuk stakeholders yang menerima pembangunan PLTPB hubungan antar stakeholders ini selain ditunjukkan dengan garis koordinasi juga lebih bersifat vertikal (perintah dari atas kebawah), dimana skema komunikasi yang dijalankan lebih bersifat divergen.

Konsep governmentality yang dipinjam peneliti dari Foucault ialah konsep kekuasaan yang melihat fenomena sosial masyarakat yang modern atau lebih ke dimodernisasi sehingga seperti yang dijelaskan Foucault ialah bahwa kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam atau berpusat pada suatu subjek atau lembaga melainkan tersebar hanya dalam setiap relasi sosial. Governmentality merupakan konsep kekuasaan pada masyarakat modern dan dipahami sebagai Disiplinary Power, dimana kekuasaan beroperasi terhadap tubuh untuk mengedepankan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan. Awalnya kondisi masyarakat Pocoléok sangat stabil dengan kerukunan, persatuan terjaga sangat baik. Masyarakat Pocoléok memiliki pemahaman atas kesatuan hidup mereka tidak terlepas dari alam sekitar. Struktur sosial budayapun masih sangat terikat dengan adat dan budaya Manggarai. Situasi ini kemudian bisa terganggu melalui proses normalisasi. Normalisasi menurut Foucault ialah model kekuasaan yang berusaha menciptakan situasi di mana individu dan subyek dapat menginternalisasikan penundukan dan menjadikannya seolah sebagai suatu keadaan yang normal. Inilah yang disebut Foucault sebagai praktik normalisasi dari berlangsungnya kekuasaan terhadap tubuh individu. (Abdil, 2021). Warga Poco Leok, menyatakan sikap penolakan proyek geothermal karena bukan kebutuhan prioritas warga saat ini. Persoalan pangan lebih penting. Poco Leok dikelilingi bukit curam sehingga rawan terjadi longsor dan banjir. "Hujan terjadi sepanjang tahun dan kampung-kampung berdekatan. Kami takut terjadi bencana bila ada proyek geothermal.

Kesimpulan

Tata kelola sumber daya alam khususnya tata kelola sumber daya panas bumi umumnya menghasilkan konflik. Dari studi-studi sebelumnya mengenai tata kelola sumber daya panas bumi ada kesamaan dengan penelitian ini seperti konflik horisontal dan vertikal, dan adanya degradasi tatanan sosial budaya. Yang menjadi perbedaan mendasar lebih kepada karakter masyarakat. Untuk konteks masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konflik yang berbeda. Perbedaan karena corak masyarakatnya, karakteristik, dan potensi konfliknya. Karakter masyarakat. Untuk konteks masyarakat yang berbeda akan menghasilkan konflik yang berbeda. Perbedaan karena corak masyarakatnya, karakteristik, dan potensi konfliknya. Tata kelola sumber daya panas bumi di desa Lungar menjadi menarik dan berbeda dengan penelitian

sebelumnya dapat terlihat: Pertama, Konteks masyarakat desa Lungar yang masih sangat kultural.

Relasi sosial masyarakat yang masih sangat komunal. Kemudian, dalam hubungan dengan kehidupan sosial politik, seperti adanya kontestasi pemilu, pilkada, pilkades, ataupun kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka masyarakat akan tetap mengedepankan unsur budaya seperti duduk melingkar secara bersama (Lonto Leok) dan bermusyawarah untuk menemukan kesepakatan bersama. Tata kelola lahan, tata kelola air, dan tata kelola kehidupan sosial masyarakat masih melekat dengan budaya dan ada manggarai. Kedua, Isu yang dibangun dalam tata kelola panas bumi ini ialah perebutan lahan sehingga melahirkan pro dan kontra diantara masyarakat. Pada dasarnya masyarakat bukan menolak tambang tetapi menolak lahannya direbut untuk dieksplorasi dan hutan dicuri untuk persediaan perusahaan nantinya

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam, (2006) Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta.:PT. GramediaPustaka Utama
- Moleong, L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Iwan Dahuri, Rokhmin, (2012) Pembangunan Wilayah, Jakarta:LP3ES
- Dahrendorf, Ralf, -Mandan, Ali (1929) Class AndClass Conflict in IndustrialSociety, Jakarta: Rajawali.
- Sari Martha Yolanda at all (2021) Universitas Andalas, Indonesia dengan judul penelitian : Gerakan Perempuan Salingka Gunung Talang dalam Menolak Pembangunan Geothermal di Kabupaten Solok
- Arief Effendi, Muh Krista, (2009) The Power of Good Corporate Governance, Jakarta: Salemba Empat
- Sandy, Alvin Yuliyas. “Kebijakan Komunikasi Pada Proyek Eksplorasi Panas Bumi Di Baturaden Dalam Perspektif FPIC.” Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 19:1(2015:1-110
- Reinhart, Hilary. “Konflik Penambangan Batugamping Kecamatan Ponjong Dalam Tinjauan Arena Bourdieu.” Jurnal Wilayah dan Lingkungan 5.1(2017):45
- Amta, Dimas Asto Ajia An. “Konflik Sosial Pertambangan Emas Tanpa Izin (Studi Tentang Dinamika Konflik Pertambangan Tanpa Izin Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo”.Diss.Universitas Gadjah Mada (2015).
- Wahyudi (2005) UGM, Yogyakarta dengan judul penelitian “kajian potensi panas bumi dan rekomendasi pemanfaatannya pada daerah prospek gunungapi ungaran jawa tengah Paknany, Yamres, Endratmo Soetarto, dan Soeryo Adiwibowo. “Pertambangan Emas di Wilayah Maluku Barat Daya: Kutukan atau Berkah.” (Studi Kasus Konflik Akses Sumber Agraria).” Sodality 5.2(2017):163-170.
- Salim, M, Nazir. “Bertani Diantara Himpitan Tambang (Belajar Dari Petani Kutai Kartanegara)”.Bhumi:Jurnal Agraria Dan Pertanahan 2.1 (2016): 31-47.
- Regus, Maximus. “Tambang Dan Perlawanan Rakyat (Studi Kasus Tambang di Manggarai NTT.” Masyarakat: Jurnal (2015):1-25.
- Ignasius Isboko, “Role Players Analysis Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)”,” Politik: Jurnal Ilmu Politik, Vol 7.No. 1, (2016).

- Bagus Putra Nugraha., “Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah,Perusahaan Dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu Di Kabupaten Banyuwangi”*Ilmu Politik: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, (2017)
- Oktaviani (2022) “Dengan Judul Penelitiann konflik tata kelola sumber daya panas bumi di desawaesano, kecamatan sanonggoang, kabupaten manggarai barat”.
- Taufik Yahya, “Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam DiKabupaten Batang Hari,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.2, (2013).
- Ratu Rahmi, Suhai, Vidya Putra, Eka, “Gerakan Sosial Perempuan Dalam Penolakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal di Nagari Batu Bajangjang Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok,”
- Dermanto, Argyo. “Strukturalisme Konflik: Pemahaman Konflik Pada MasyarakatIndustri Menurut Lewis Coser dan Rlaf Dahrendorf”. *Dilema*, Vol. 24 No.1 (2010)
- Jati, Wasisto Raharjo. “Manajemen Tatat Kelola Sumber Daya Alam BerbasisParadigma Ekologi Poltik”. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 3 No.2 (2012).
- Britta Klagge, Clemens Grainer, David Greven, dan Chigozie. “Cross-Scale LiOf Centralized Electricity Generation: Gheothermal Development and Investor-Community Relation In Kenya”.*Politics and Governance*, Vol.8 No.3 (2020)
- Philippe, Anne Masseran, Yeny Serrano. “Information Exercise and publicconsultationon geothermal projects, The Strasbourg Case”. *European Geothermal Congress*(2016).
- Abdil Munhi Mudhoffir.“Teori Kekuasaan Michael Foucoult: Tantangan BagiSosiologi Politik”.*Jurnal Sosiologi*, Vol.18 No.1 (2013).
- Mi’Rojul Huda. “Analisis Konflik Dalam Industri Migas (Studi KasusKonflikMasyarakat Dan PT.Energi Mineral Langgeng di Desa Tanjung, Kabupaten Sumenep)”. PhD Thesis. Universitas Airlangga (2017)
- Mila Utami Sari at all (2020) ,universitas pertahanan dengan Judul Penelitian kebijakan perizinan panas bumi sebagai pembangkit listrik untuk mendukung ketahanan energi nasional
- Foucault. 1978. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*.New York: the New Press
- Dahrendorf, Rafl. 1986. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritis*. Jakarta: Rajawali Press

**KOMUNIKASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN 2021**

**Studi Tentang Budaya *Pahappa* Sebagai Media Komunikasi Politik Di Desa Watu
Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur**

**POLITICAL COMMUNICATION IN THE 2021 VILLAGE HEAD
ELECTION**

**Study of *Pahappa Culture* as a Media of Political Communication in Watu Hadang
Village, Umalulu District, East Sumba Regency**

Yakobus Tamu Ama, Rex Tiran, Yeftha Y. Sabaat

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

tamuamayakobus2000@gmail.com

Abstract

In Sumba tribal culture, *Pahappa* has a very important role as a means of communication between communities. Before the village head election, *Pahappa* culture, which is a form of communication between resident in communicating on Sumba Island, experienced a shift in meaning form socio-cultural values left behind by their ancestors to political values in the Watu Hadang village area, Umalulu District, East Sumba Regency. This is what makes the author interested in researching the little of this research. The title of this study is Political Communication in the 2021 Pilkadaes (Case Study of *Pahappa Culture* as a Media of Political Communication in Village Head Elections in Watu Hadang Village, Umalulu District, East Sumba Regency). The purpose of this study is that researchers want to explore the extent to which *Pahappa* is used as a medium of political communication in the Village Head Election, and researchers also want to know the supporting and inhibiting factors of Watu Hadang Village Head's victory by using *Pahappa* as a medium in political communication. The theory used is Political Communication Theory in which there are five indicators of Political Communicators, Political Messages, Political Channels or Media, Political Targets or Targets and Influence or Effects of Political Communication. The data collection method in this study was obtained through interviews with the elected Watu Hadang Village Head, community leaders, traditional leaders, youth leaders, and documentation. The results of this study show that to win the village head election, a winning strategy is needed. In addition to the winning strategy in this study is the Role of *Pahappa Culture* as a medium of political communication. How is the role of *Pahappa* as a form of cultural honor used in the election event to be culturally added value. The culture is very closely attached to the people of Watu Hadang Village. *Pahappa* is also a form of acceptance and respect from the host towards guests, and vice versa. One of the most important traditional instruments, if a traditional activity or ritual is carried out without *Pahappa*, then the activity cannot be carried out.

Keywords : political communication, village head election, pahappa culture.

Abstrak

Dalam budaya suku Sumba *Pahappa* memiliki peranan yang sangat penting sebagai sarana perantara komunikasi antar masyarakat. Menjelang pemilihan Kepala Desa budaya *Pahappa*

yang merupakan suatu komunikasi antar warga dalam berkomunikasi di pulau Sumba mengalami pergeseran makna dari nilai sosial budaya yang ditinggalkan para leluhur menjadi nilai politik di wilayah Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk meneliti judul penelitian ini. Judul penelitian adalah Komunikasi politik pada Pilkades 2021 (Studi Kasus Budaya *Pahappa* Sebagai Media Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur). Tujuan penelitian ini adalah peneliti ingin menggali bagaimana *Pahappa* dijadikan sebagai media komunikasi politik dalam Pemilihan Kepala Desa, serta peneliti juga ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat kemenangan Kepala Desa Watu Hadang dengan menggunakan *Pahappa* sebagai media dalam komunikasi politik. Teori yang digunakan adalah Teori Komunikasi Politik yang di dalamnya terdapat lima indikator antara lain : Komunikator Politik, Pesan Politik, Saluran atau Media Politik, Sasaran atau Target Politik dan Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada Kepala Desa Watu Hadang terpilih, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memenangkan pemilihan Kepala Desa diperlukan adanya strategi pemenangan. Selain strategi pemenangan dalam penelitian ini adalah Peran Budaya *Pahappa* sebagai media komunikasi politik. Bagaimana peran *Pahappa* sebagai bentuk kehormatan secara budaya yang digunakan dalam ajang pemilihan agar menjadi nilai tambah secara budaya. Budaya yang sangat melekat erat dengan masyarakat Desa Watu Hadang. *Pahappa* juga merupakan bentuk penerimaan dan penghormatan dari tuan rumah terhadap tamu, begitu pun sebaliknya. Salah satu instrumen adat yang paling penting, jika kegiatan atau ritual adat dilaksanakan tanpa adanya *Pahappa*, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Pemilihan Kepala Desa, Budaya Pahappa.

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya *Pahappa* dimanfaatkan sebagai media komunikasi politik oleh Calon Kepala Desa Watu Hadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur agar dapat memenangkan Pemilihan Kepala Desa. *Pahappa* (siri pinang) merupakan salah satu budaya yang ada di Kabupaten Sumba Timur. *Pahappa* atau sirih pinang merupakan sajian khusus untuk masyarakat Sumba baik dalam upacara adat, perkawinan, dan lain sebagainya.

Budaya *Pahappa* sangat penting dalam kehidupan masyarakat Sumba. *Pahappa* merupakan salah satu material adat yang ada di Kabupaten Sumba Timur, fungsinya sebagai media pemersatu Budaya Sumba, sekaligus dapat menciptakan kerukunan hidup diantara masyarakat yang hadir dalam pertemuan adat. Selain itu, *Pahappa* juga merupakan salah satu simbol penghargaan dan penghormatan bagi tamu dari tuan rumah. *Ngangu pahappa* adalah istilah untuk makan sirih pinang dalam bahasa Sumba Timur yang memerlukan bahan-bahan lain sebagai ramuannya, yang terdiri dari Kutta (sirih), Kapu (kapur), Hambaku (tembakau), Winnedu (pinang).

Penggunaan *Pahappa* sebagai media komunikasi politik merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba yang ingin ikut dalam ajang kontestasi politik, dalam hal ini ingin mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa. Hal ini dikarenakan *Pahappa* dinilai menjadi titik lemah budaya jadi dengan mudah dimanfaatkan oleh para aktor politik untuk mendapat suara atau simpati di tengah masyarakat. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah persoalan di tengah masyarakat, pemanfaatan budaya untuk kepentingan pribadi dapat

menyebabkan lunturnya kesakralan dari nilai budaya tersebut. Hal ini biasanya dilakukan diawal seseorang ingin mencalonkan diri atau ingin ikut berkontestasi dalam ajang politik. Biasanya seseorang yang akan mencalonkan diri membawa “Mbola Pahappa” (tempat Siri dan Pinang) kepada ketua adat atau orang yang dituakan dalam kelompok masyarakat, untuk menyatakan maksud dan tujuannya.

Hal ini sangat penting dilakukan untuk seseorang yang ingin berkontestasi dalam ajang politik agar dapat didukung dan memiliki basis suara di dalam kelompok masyarakatnya sendiri, sebelum keluar untuk mencari suara tambahan. Itu pun menjadi strategi awal bagi para Calon Kepala Desa sebelum berkecimpung dalam ajang kontestasi politik, selain visi dan misi yang baik, langkah memberikan “Mbola Pahappa” juga diartikan sebagai salah satu strategi untuk meminta persetujuan sekaligus meminta dukungan dari para tetua adat atau masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh, sehingga masalah yang di bahas oleh kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya dengan sanksi yang ditentukan bersama melalui lembaga politik. Komunikasi Politik secara umum dapat dimaknai dalam kerangka politik sebagai upaya peran atau aktor dalam mencapai tujuan. Berpolitik pada dasarnya adalah berkomunikasi.

Komunikasi politik terdiri dari berbagai unsur, antara lain :

a. Komunikator Politik

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal- hal yang mengandung makna mengenai politik, misalnya presiden, menteri, anggota DPR, politisi, dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa mempengaruhi jalannya pemerintahan.

b. Pesan Politik

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal, baik yang disadari maupun yang tidak disadari yang isinya mengandung politik. Misalnya pidato politik, pernyataan politik, buku, brosur, dan berita surat kabar mengenai politik.

c. Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya alat komunikasi budaya yaitu Pahappa yang dijadikan sebagai media komunikasi politik dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur oleh para komunikator politik.

d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan member dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, pemuda, perempuan, mahasiswa, dan semacamnya.

e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan partai-partai politik, keaktifan masyarakat dan partisipasi politik, dimana nantinya akan berdampak pada pemberian suara dalam Pemilihan Umum.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (utuh). Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Studi Kasus (Case Study). Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang

dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Deskriptif nantinya digunakan untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara objektif..

Hasil

Komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna mengenai politik. Dalam hal ini Rihart M. N. Watuwaya sebagai Calon Kepala Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur dan juga tim sukses pemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa. Peneliti menyimpulkan bahwa peranan budaya menjadi suatu hal yang penting dalam proses politik, apalagi jika dihadapkan dengan kondisi sosial budaya yang masih sangat kental dan berbudaya. Inilah yang menjadikan peran *Pahappa* sebagai media komunikasi politik sangat penting. Karena budaya *Pahappa* ini sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap sesama, juga merupakan alat komunikasi dalam berbudaya bagi masyarakat. *Pahappa* sendiri merupakan salah satu unsur adat yang bisa dikatakan paling penting, karena jika proses pelaksanaan ritual adat baik untuk adat orang mati (*Li Meti*) maupun untuk proses pelaksanaan adat orang yang masih hidup (*Li Luri*). Artinya bahwa setiap komunikasi yang dilakukan selalu menggunakan *Pahappa* sebagai bagian dari pembuka pembicaraan dengan tujuan menghargai dan menghormati sesama secara adat dan budaya. Budaya itu sendiri sangat melekat erat dengan kehidupan masyarakat Desa sehari-hari, apalagi budaya *Pahappa* ini merupakan makanan khas untuk orang Sumba pada umumnya. Hal ini tentunya dimanfaatkan oleh aktor politik dalam ajang kontestasi pemilihan kepala desa, hal ini sudah strategi yang selalu digunakan pada ajang kontestasi politik.

Pesan politik ialah pernyataan yang disampaikan oleh Rihart Watuwaya sebagai calon Kepala Desa Watu Hadang baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun nonverbal. Pesan politik yang disampaikan oleh Rihart Watuwaya bersama tim sukses melalui media *Pahappa* menjelang kontestasi Pilkades yaitu membuka ruang sesi tanya jawab dan harapan bagi setiap masyarakat Desa Watu Hadang yang dikunjungi. Pada kesempatan itu pula Rihart Watuwaya bersama tim sukses meminta dukungan kepada masyarakat baik secara individu lewat pemangku adat dan juga kepada kelompok masyarakat yang hadir dalam setiap pertemuan politik. Peneliti menyimpulkan bahwa proses sosialisasi merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Tetapi tidak hanya visi/misi sebagai bentuk pesan-pesan politik, melainkan harus menguasai persoalan-persoalan yang ada di desa serta juga bisa memberikan solusi atau sebuah alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Watu Hadang. Sebagai calon pemimpin kita harus mempunyai kepekaan sosial yang tinggi terhadap persoalan yang ada di tengah masyarakat, tidak terlepas hanya mengetahui saja melainkan harus berperan aktif dalam mencari solusi serta terlibat secara penuh dalam proses penyelesaian masalah yang ada di tengah masyarakat.

Saluran atau media yang digunakan oleh Rihart Watuwaya sebagai media komunikasi politik adalah *Pahappa* (sirih pinang). *Pahappa* atau sirih pinang merupakan sebuah alat komunikasi budaya bagi orang Sumba pada umumnya. Budaya *Pahappa* merupakan salah satu simbol yang mendefinisikan identitas *Tau Humba* (Orang Sumba). *Pahappa* dalam masyarakat memiliki peran sebagai sarana dan simbol pendekatan, interaksi sosial, pengikat/penghubung, kekeluargaan, pemersatu, pendamai. Menjelang Pilkades fungsi *Pahappa* dalam ranah sosial budaya masyarakat beralih fungsi dalam ranah politik, terlihat menjelang pemilihan Kepala Desa di Desa Watu Hadang *Mbuala Pahappa* berisikan pinang(*winu*), sirih (*kutta*), dan kapur(*kapu*) merupakan alat perantara atau penghubung pembicaraan mereka pada kelompok-kelompok masyarakat. diatas peneliti menyimpulkan bahwa peranan *Pahappa* sangat penting dalam kehidupan orang sumba dan menjadi bagian dalam penting kehidupan sehari-hari. *Pahappa* itu sendiri merupakan suguhan selamat datang serta penghormatan dari tuan rumah

terhadap tamu maupun sebaliknya. *Pahappa* ini sendiri merupakan salah satu instrument terpenting dalam adat/budaya masyarakat Sumba pada umumnya. Penggunaan *Pahappa* menjadi sebuah media atau saluran dalam berkomunikasi dalam sebuah budaya ataupun dalam kontestasi politik sudah sangat sering digunakan, bahkan dalam ajang kontestasi politik ini sudah menjadi sebuah strategi yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam hal mempengaruhi basis pemilih sehingga berdampak hasil akhir dalam Pemilihan Kepala Desa.

Sasaran politik adalah masyarakat Desa Watu Hadang itu sendiri yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara dalam ajang kontestasi politik Pemilihan Kepala Desa di Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. peneliti menyimpulkan bahwa budaya sirih pinang atau *Pahappa* merupakan salah unsur penting untuk bagaimana kita diterima dan dihargai ditengah hidup sosial dan bermasyarakat. Apalagi ketika dikaitkan dalam suasana politik ketika adanya ajang pemilihan kepala desa, hal ini tentunya mempunyai pengaruh dan juga menjadi pertimbangan khusus yang dinilai dari masyarakat. Pengaruh budaya juga sering kali dapat mempengaruhi jalan serta hasil dari pemilihan atau ajang kostestasi politik itu sendiri. Dimana budaya merupakan hal yang sangat melekat erat bagi kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana peran penting budaya *Pahappa* yang menjadi media dalam komunikasi politik ketika ajang pemilihan Kepala Desa di Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Selain digunakan sebagai bentuk komunikasi budaya, *Pahappa* juga selalu menjadi bagian penting dalam ajang kontestasi politik. Hal ini disebabkan oleh pentingnya nilai-nilai budaya *Pahappa* bagi orang Sumba khususnya masyarakat Desa Watu Hadang. *Pahappa* sebagai bentuk pembuka komunikasi, penerimaan, penghargaan dan penghormatan terhadap sesama, kandungan nilai-nilai inilah yang membuat *Pahappa* sangat penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbudaya masyarakat Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Inilah yang menyebabkan *Pahappa* selain sebagai budaya, *Pahappa* juga sering dijadikan sebagai alat atau media komunikasi politik dalam ajang kontestasi politik.

Dampak dari beragam bentuk pesan atau komunikasi yang ditransfromasikan dalam interaksi komunikasi bagi target audiens yang menjadi sasaran komunikasi politik melalui saluran atau media politik. Pengaruh komunikasi politik diharapkan menjadi sebuah angin segar dari masyarakat terhadap calon kepala Desa yang maju dalam ajang kontestasi politik. Pemberian pengertian serta pemahaman-pemahaman terkait visi/misi ataupun program-program yang direncanakan oleh calon kepala desa terhadap masyarakat Desa Watu Hadang dengan harapan akan berdampak baik pada hail pemilihan Kepala Desa Watu Hadang kedepan. Efek komunikasi yang baik tentunya ditandai dengan rasa simpati masyarakat terhadap calon Kepala Desa. diatas peneliti menyimpulkan bahwa, selain peranan budaya yang sangat penting, latar belakang dan karakteristik setiap calon juga menjadi hal yang sangat penting yang diperhatikan oleh setiap warga masyarakat. Apalagi ketika kita pernah mempunyai pengalaman yang buruk dalam memimpin atau dipercaya mengolah suatu kegiatan atau proyek yang ada di desa, maka hal tersebut akan melekat erat terus menerus pada diri kita. Apalagi ketika dalam masa pemerintahan sebelumnya kita menjadi bagian didalamnya namun tidak mampu memberikan sedikit pun perubahan bagi perkembangan dan pembangunan di Desa, maka hal tersebut otomatis menjadi salah satu hal yang dapat membuat nama kita kurang baik di tengah masyarakat.

Langkah strategis yang dilakukan oleh seorang komunikator politik untuk mencapai tujuan komunikasi politik adalah bagaimana menggunakan berbagai media termasuk penggunaan *Pahappa* sebagai salah satu media strategis komunikasi politik secara langsung maupun tidak langsung pada pemilihan Kepala Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021. Hal ini terlihat pada dar bagaimana calon Kepala Desa

dan tim sukses menciptakan kebersamaan mereka antara politikus dengan masyarakat yang berada di Desa Watu Hadang. Arifin (2006 : 63-64) mengungkapkan bahwa suasana homifili (kecenderungan yang sama) harus diciptakan antara politisi dan masyarakat, yaitu persamaan bahasa sebagai simbol komunikasi, persamaan dalam hal berpakaian, persamaan hak dengan masyarakat, terutama dalam hal pesan politik, metode dan media politik yang digunakan. peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh Rihart Watuwaya beserta tim sukses pada Pemilihan Kepala Desa Watu Hadang Tahun 2021 yakni dengan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat dengan selalu membawa *Pahappa* dalam setiap pertemuan atau kampanye politik mereka di tengah masyarakat saling menyuguhkan *Pahappa* merupakan bentuk penghargaan dan menyentuh perasaan orang Sumba sehingga Rihart Watuwaya diterima karena kerendahan hati dan menghargai sesama. Penggunaan *Pahappa* ini juga untuk meminta restu politik pada tokoh-tokoh utama seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya di wilayah Desa Watu Hadang. peneliti menyimpulkan bahwa bentuk kampanye politik yang dilakukan oleh Rihart Watuwaya beserta tim sukses pada Pemilihan Kepala Desa Watu Hadang Tahun 2021 yakni dengan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat dengan selalu membawa *Pahappa* dalam setiap pertemuan atau kampanye politik mereka di tengah masyarakat saling menyuguhkan *Pahappa* merupakan bentuk penghargaan dan menyentuh perasaan orang Sumba sehingga Rihart Watuwaya diterima karena kerendahan hati dan menghargai sesama. Penggunaan *Pahappa* ini juga untuk meminta restu politik pada tokoh-tokoh utama seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain sebagainya di wilayah Desa Watu Hadang. diatas peneliti menyimpulkan bahwa sirih pinang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Desa Watu Hadang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan adat. Dalam kegiatan apapun sirih pinang selalu menjadi prioritas utama, karena hal tersebut sudah menjadi keharusan yang mengikat secara tidak langsung bagi masyarakat Desa Watu Hadang. Jika hal tersebut dihilangkan atau dilupakan dalam sebuah acara ataupun kegiatan maka hal tersebut akan menjadi hal yang buruk bagi diri kita, mulai dari kita tidak tau dan paham dengan adat dan istiadat sampai dengan bahwa kita tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain.

Kesimpulan

Pahappa merupakan salah satu media sebelum melakukan interaksi atau komunikasi antar warga masyarakat atau juga interaksi dengan leluhur melalui upacara adat. Tradisi makan *Pahappa* (sirih pinang) terdiri dari *Winnu (pinang)*, *Kutta (siri)*, *Kapu (kapur)*, dalam media yang tidak terpisahkan. Aktivitas tersebut selalu dijumpai, baik dalam berbagai kegiatan maupun kehidupan masyarakat, yang tidak terlepas dari *Ngangu Pahappa*.

Menjelang Pilkades fungsi *Pahappa* dalam ranah sosial budaya masyarakat beralih fungsi dalam ranah politik, terlihat menjelang pemilihan kepala desa di Desa Watu Hadang, *Pahappa* berisikan pinang, siri dan kapur merupakan alat perantara atau penghubung pembicaraan mereka pada kelompok-kelompok masyarakat seperti Maramba (raja), *Tau Ma Tua* (Para orang tua), tokoh masyarakat dan lain sebagainya.

Penggunaan *Pahappa* sebagai salah satu media komunikasi politik diantara begitu banyak media dikarenakan kondisi masyarakat di Desa Watu Hadang yang lebih terbuka menerima pesan politik apabila disampaikan sesuai dengan kebiasaan atau tradisi masyarakat. Menjelang pemilihan kepala desa di Desa Watu Hadang, Rihart Watuwaya dan tim suksesnya melakukan berbagai komunikasi politik sebagai strategi pendekatan mereka dengan masyarakat, termasuk pendekatan menggunakan *Pahappa*. Rihart Watuwaya menggunakan

Pahappa untuk membangun relasi, komunikasi bersama tokoh adat untuk mendapatkan dukungan serta mengarahkan pilihan dalam Pilkades mempengaruhi

Daftar Pustaka

- Arafah, Burhanudin. 2018. Warisan budaya, Pelestarian dan Pemanfaatannya. Fakultas Ilmu budaya, UNHAS.
- Ardial. 2008. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Indeks
- Arifin, Anwar, 2003. Komunikasi Politik Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
- Cangara, Hafied, M.Sc., Ph.D. 2016. Komunikasi Politik. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA
- Halking. 2008. *Pendidikan Politik*. Medan. Fakultas Ilmu Sosial. Unimed.
- Junaedi, Fajar. 2013. Komunikasi Politik (*teori, aplikasi dan strategi*). Yogyakarta: Buku Litera.
- Johs, 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholil, Syukur, 2006. Metodologi penelitian komunikasi, Bandung: CitaPustaka.
- Lili Weri, Alo, 2007. Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya, Yogyakarta: Lkis.
- Mc Niar, Brian. 2016. Pengantar Komunikasi Politik. Bandung: Nusa Media.
- Mukarom, Zaenal, 2012. Komunikasi Politik, Pustaka Setia Bandung.
- Nimmo, Dan, 2006. Komunikasi Politik : Konsep, teori, dan Strategi. Jakarta, Rajawali.
- Rauf, Maswadi, 1993. Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Setiawan, Amiruddin. 2015. Jurnal Budaya Politik Dalam Komunikasi Politik di Indonesia. Dosen Prodi Administrasi Negara Universitas Majalengka.
- Wisesa, Yan Anugrah. Mardika, I Putu. 2017. Jurnal Tradisi Sebagai Media Komunikasi. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.
- Amelianti, Fitri. 2021. Komunikasi Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Segati. Skripsi. Universitas Islam Riau.
- Yina, Merlan Rongga. 2019. *Pahappa* Sebagai Nilai Solidaritas. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.

DINAMIKA PRAKTIK PERJUDIAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
Studi Tentang Praktik Judi Dalam Pemilihan Kepala Desa Oemofa Kecamatan Amabi
Oefeto Timur Kabupaten Kupang

DYNAMICS OF GAMBLING PRACTICES IN VILLAGE HEAD
ELECTIONS

Study on Gambling Practices in Village Head Elections Oemofa Amabi Oefeto Timur
District, Kupang Regency

Roni Seriano Nope ^{1*}, Esrah D.N.A Benu ², Yonathan Lopo ³

¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: ronnynope57@gmail.com

Abstract

This research discusses the dynamics of gambling practices in head elections (Case study in Oemofa Village, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency). This study explains that the practice of gambling in village elections is motivated by economic factors to gain profits, social habits of people who are accustomed to various types of gambling, as well as political factors, namely the influence on the community to vote for candidates favored by gamblers. This research aims to determine gambling practices, actor motivation, analyze gambling practices and read patterns of gambling practices in village elections in Oemofa Village. This research uses a type of qualitative descriptive research, while the theories used are action theory and role theory. The research results show that the dynamics of gambling practices in village elections occur due to economic factors, namely the demands of life's necessities, social factors, namely the habit of people who frequently gamble, and political factors, namely efforts to influence the community to vote for candidates favored by gamblers.

Keywords: Election, Village, Gambling

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang dinamika praktik perjudian dalam pemilihan kepala (Studi kasus di Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang). Studi ini menjelaskan bahwa praktik dalam pilkades perjudian dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi untuk mendapatkan keuntungan, faktor kebiasaan sosial masyarakat yang terbiasa dengan berbagai jenis judi, serta faktor politik yakni adanya pengaruh terhadap masyarakat untuk mencoblos kandidat yang dijagoankan oleh pelaku penjudi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perjudian, motifasi aktor, menganalisis praktik perjudian dan membaca pola praktik perjudian dalam pilkades di Desa Oemofa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adapun teori yang digunakan adalah teori aksi dan teori peran. Hasil penelitian menunjukkan dinamika praktik perjudian dalam pilkades terjadi karena faktor ekonomi yakni tuntutan kebutuhan hidup, faktor sosial yakni kebiasaan masyarakat yang sering berjudi serta faktor politik yakni adanya upaya mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos kandidat yang dijagoankan oleh penjudi.

Kata kunci: Pemilihan, Desa, Judi

Pendahuluan

Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika praktik perjudian dalam pemilihan kepala desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Dalam praktik pemilihan langsung baik eksekutif maupun legislatif, fenomena dan praktik judi jamak terjadi

disembarang tempat dan waktu, dengan berbagai varian dan bentuk judi yang beragam. Secara etimologis, judi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan kemudian berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang jumlah uang harta semula.

Biasanya pelaku judi akan bertambah banyak ketika ada momen yang Perjudian sebagai praktik normal dan keseharian serta bukan hal yang baru bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Oemofa yang selalu berjudi dengan harapan bisa mendapatkan kemenangan dengan jumlah yang besar, Hal ini dikarenakan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, bahkan aparat penegak hukum seakan-akan tutup mata terhadap permasalahan ini yang mempengaruhi mereka. melibatkan masyarakat banyak seperti pemilahan kepala desa (Pikades). Secara sosial masyarakat di Desa Oemafa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang sudah terbiasa berjudi. Munculnya perjudian dalam pilkades dari segi faktor sosial adalah karena warga masyarakat desa sudah terbiasa akan perjudian. Seperti perjudian togel, perjudian kartu, perjudian kuru- kuru (dadu), perjudian bola guling, dan perjudian beliar.

Faktor ekonomi merupakan alasan mendasar bagi setiap orang yang menggeluti perjudian. Adanya keinginan untuk menang, mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam pertarungan dan berkeinginan untuk hidup layak merupakan alasan mengapa seseorang mau melakukan perjudian.

Selain faktor ekonomi dan juga kebiasaan sosial, judi juga bisa dilihat sebagai bagian dari strategi politik, bahkan dalam derajat tertentu digunakan sebagai alat untuk meraih dukungan dari kalangan masyarakat untuk mempermainkan emosi lawan. Salah satunya dengan melakukan perjudian.

Perjudian menjadi varian lain dari politik uang dalam pilkades, karena perjudian dapat mengatur jalannya pilkades dengan cara membayar masyarakat untuk memilih kandidat yang didukung oleh para pelaku penjudi atau tim sukses. Praktik perjudian semacam ini, sudah menjadi hal yang biasa terjadi didalam masyarakat Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang. Bahkan metode ini wajib digunakan apabila seorang calon keluar sebagai pemenang dalam pilkades tersebut. Praktek perjudian dalam pilkades seolah-olah suatu ajang demokrasi yang luar biasa bagi masyarakat setempat, dan merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap pilkades. Karena perjudian seperti ini merupakan adu gengsi para kandidat sekaligus pembuktian bahwa calon-calon Kepala Desa yang bertarung. Pada hal, hakikatnya dari sebuah pemilu dan pilkades yaitu mencari simpati dari rakyat dengan menyampaikan visi dan misi yang baik demi kesejahteraan rakyat sesungguhnya. Permasalahan yang diuraikan diatas menarik untuk diteliti karena praktik perjudian pada pemilihan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang hampir merata disemua desa. berdasarkan pemikiran inilah penulis ingin meneliti tentang dinamika praktik perjudian dalam pilkades dengan judul penelitian yaitu “Dinamika Praktik Perjudian Dalam Pilkades, Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang”

Metode

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan pokok masalah yang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai karakteristik pokok yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang

jelas mengenai Dinamika Praktik Perjudian Dalam Pilkades, Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008:218) purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi keinforman adalah Pelaku Perjudian, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang.

Hasil

Pada bagian ini penulis menguraikan hasil penelitian serta pembahasannya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kutipan wawancara dengan para informan, grafiik, serta tabel. Kutipan wawancara dengan para informan, grafik, serta tabel ditampilkan sesuai dengan sub pembahasan sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Dalam konteks Dinamika Praktik Perjudian Dalam Pilkades, Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang

Berdasarkan temuan fakta diatas maka perbandingan pemilihan tahun 2016 dan 2022 peniliti menyimpulkan bahwa praktik judi yang dilakukan masyarakat pada saat pemilihan kepala desa berpengaruh tapi sangat rendah yaitu hanya ter jadi peningkatan sebesar 0.63% pada penurunan angka golput.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai proses peralihan pemerintah Desa dan sebagai ajang perjudian dan pertentangan diantara masyarakat Desa baik praktik perjudian maupun konflik sosial dalam berkampanye. Namun kenyataannya idealitas yang dibangun dalam sebuah proses pemilihan Kepala Desa sering kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan malah menjadi ajang baru yang seringkali timbul sebuah Dinamika yang terjadi antara beberapa pihak dan benturan-benturan fisik antara pendukung calon Kepala Desa tidak lain halnya dengan pemilihan kepala Desa di Desa Oemofa Kecamatan Amabi Oefeto Timur Kabupaten kupang yang tidak luput dari praktik perjudian dan pertentangan diantara masyarakat maupun Tim sukses. Para pendukung atau pelaku penjudi yang sering berjudi dalam lingkungan sekitar memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan taruhan sebesar Rp. 6.000.000.00 dari pihak kandidat nomor satu untuk bertaruh dengan pendukung kandidat nomor dua, faktor ekonomi juga menjadi pendorong pelaku melakukan taruhan dengan harapan memperoleh kemenangan dalam perjudian serta memenangkan kandidat dan terdapat juga faktor Srategi politik adanya pengaruh atau hasutan terhadap masyarakat berupa membelikan rokok, minuman tradisional dan memberikan uang siri pinang untuk memilih kandidat yang dijagoankan.

Adapun pelaku lain yang melakukan perjudian dengan mengajak beberapa orang temannya pendukung kandidat nomor satu maupun anak muda untuk patungan sehingga terkumpulnya Rp 5.000.000.00 untuk menantang pendukung kandidat nomor dua agar melakukan taruhan perjudian. akibat kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, aparat penegak hukum seakan-akan tutup mata terhadap permasalahan ini sehingga terjadinya transaksi perjudian.

Pada pemilihan Kepala Desa di Desa Oemofa seharusnya menjadi ajang demokrasi tetapi malah justru diwarnai dengan adanya Praktik perjudian.

Latar Belakang Munculnya Perjudian Dalam Pilkades Perjudian menjadi suatu keharusan bagi sebagian masyarakat desa. Hampir dalam aktifitas sehari- hari selalu diwarnai dengan kegiatan perjudian. Moment demokrasi desa seperti adanya pemilihan kepala desa

merupakan moment yang paling menyenangkan bagi masyarakat desa yang haus akan perjudian.

Motif Ekonomi; Motivasi aktor praktek perjudian yang berhubungan dengan faktor ekonomi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) Motivasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi Motivasi ini adalah motivasi yang paling umum dijumpai. 2) Motivasi untuk mengatasi kesulitan ekonomi Motivasi ini biasanya dijumpai pada para aktor perjudian yang mengalami kesulitan ekonomi. Motivasi aktor praktek perjudian yang berhubungan dengan faktor kebiasaan sosial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: 1) Motivasi untuk mengikuti kebiasaan sosial Motivasi ini biasanya dijumpai pada masyarakat yang memiliki budaya perjudian yang kuat. 2) Motivasi untuk mendapatkan pengakuan sosial Motivasi ini biasanya dijumpai pada para aktor perjudian yang ingin mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat. Motivasi aktor praktek perjudian yang berhubungan dengan faktor strategi politik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: Motivasi untuk mendapatkan keuntungan politik, Motivasi ini biasanya dijumpai pada para aktor perjudian yang memiliki kepentingan politik. Para aktor perjudian ini melakukan praktik perjudian untuk mendapatkan keuntungan politik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 1) Motivasi untuk melemahkan lawan politik Motivasi ini biasanya dijumpai pada para aktor perjudian yang ingin melemahkan lawan politiknya. 2.) Perjudian sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan politik Perjudian dapat menjadi sarana untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat.

Pertaruhan pilkades hampir menyentuh disemua strata sosial yang ada di desa. Baik itu digolongkan atas, menengah, lebih-lebih golongan kelas bawah yang tidak mau kalah dengan pesta pertaruhan atau perjudian. Praktik perjudian yang dilakukan masyarakat atau oknum masyarakat tertentu sering ditemui menjelang dan pada saat pilkades. Untuk memperoleh keuntungan sekaligus memenangkan kandidat yang dijagoankan karena kurangnya kontrol dari aparat kepolisian setempat jadi masyarakat dengan mudah melakukan perjudian sehingga praktik perjudian tersebut bukan hal baru lagi bagi masyarakat sekitar. kebiasaan masyarakat dilingkungan sekitar yang sering melakukan praktik perjudian kupon putih, beliar atau dadu maupun kartu praktik pada saat pilkades itu terjadi karena sudah menjadi faktor kebiasaan sosial sehingga masyarakat melakukan taruhan dengan harapan memperoleh kemenangan dari perjudian tersebut untuk keuntungan pribadi. praktik politik sudah melenceng dari politik yang sehat karena adanya praktik perjudian atau kampanye dengan melakukan upaya untuk menjatuhkan nama lawan politik. adanya perjudian dalam Adanya juga praktik money politic kandidat yang membagikan uang secara langsung kepada masyarakat dari salah satu kandidat pada hari-hari sebelum pilkades berlangsung. faktor ekonomi tuntutan kebutuhan hidup dan kebiasaan sosial masyarakat sering berjudi sehingga kecanduan, yang menjadi pendorong pelaku melakukan praktik perjudian pada saat pilkades dan adanya faktor politik upaya untuk mempengaruhi masyarakat agar mencoblos kandidat yang didukung oleh penjudi.

Kesimpulan

Dengan Demikian berdasarkan analisis hasil wawancara dan pengamatan peneliti maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa: Praktik perjudian yang terjadi di Desa Oemofa pada saat Pilkades akibat dari kelalaian dari pihak-pihak yang berperan penting di dalam Pilkades dan seluruh masyarakat Desa Oemofa, Terdapat empat bentuk politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Oemofa yaitu 1) Faktor ekonomi 2) Faktor sosial 3) Faktor politik, dan 4) serangan fajar. Aktor yang terlibat dalam Pilkades di Desa Oemofa adalah aktor ekonomi, sosial dan politik, dari ini yang memicu terjadinya praktik perjudian, karena jumlah uang yang ditawarkan sehingga terjadinya persaingan yang melibatkan uang, oleh karena itu seharusnya pemerintah setempat melarang agar tidak terjadinya praktik perjudian atau transaksi

perjudian pada saat pilkades tersebut berlangsung. Praktik perjudian sampai saat ini belum ada tindakan respon dari pemerintah untuk mencegah perjudian yang terjadi di Desa Oemofa sehingga sampai saat ini masih ada perjudian disekitar lingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Akhbar & Usman.(2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, S. (2019).*Prosedur Penelitian*.Jakarta: Rineka cipta.
- Bogdan dan Biklen Kopp Sari, 1982, *Qualitive Research For Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, inc,: Boston London.
- Moleong, J. Lexi. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Prof. Drs. Haw Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah*. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2014).*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

**POLITIK IDENTITAS SUKU DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2020****Studi Di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur****ETHNIC IDENTITY POLITICS IN THE 2020 NORTH CENTRAL
TIMOR REGENCY REGIONAL ELECTIONS****Study in Taekas Village, East Miomaffo District**Aloysius Gonsaga Abi^{1*}, Ananias Riyoan Philip Jacob², Syahrin B. Kamahi³¹*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*²*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*³*Program Studi Ilmu Politik – Universitas Nusa Cendana*

*Korespondensi: gonsaabi@gmail.com

Abstract

Tribal Identity Politics in the 2020 North Central Timor Regency Regional Head Election had a huge impact in terms of general elections. This study aims to determine tribal identity politics in the 2020 North Central Timor Regency regional head election and to determine the role and impact of ethnic identity politics in the 2020 North Central Timor Regency regional head election. The type of research used in this study is a type of qualitative research with a case study approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of this study are known that, in the contestation of local elections in TTU District, especially in Taekas Village, there has been a politicization of tribal identity. The manifestation of this tribal politicization is that the people in Taekas Village choose according to their tribe where the goal is to strengthen their tribal base. Tribal identity politics as a tool in manipulating and mobilizing the masses creates 2 impacts which can strengthen integrity in the tribe and also cause disintegrity in society.

Keywords: Identity politics, regional elections, elections.

Abstrak

Politik Identitas Suku dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar dalam hal pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik identitas suku dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 dan untuk mengetahui peran dan dampak politik identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, dalam kontestasi Pilkada di Kab. TTU khususnya di Desa Taekas telah terjadi yang namanya politisasi identitas suku. Wujud dari politisasi suku ini adalah, masyarakat di Desa Taekas memilih sesuai dengan sukunya dimana tujuannya adalah untuk menguatkan basis suku mereka. Politik identitas suku sebagai alat dalam memanipulasi dan memobilisasi massa menciptakan 2 dampak dimana mampu menguatkan integritas dalam suku dan juga menimbulkan diintegritas dalam masyarakat.

Kata kunci: Politik Identitas, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu.

Pendahuluan

Di arena politik, identitas suku dihembuskan sebagai isu putra daerah yang kebanyakan dilakukan oleh Elit lokal untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politiknya. Tentang hal ini, Eindhoven dengan tegas menyatakan bahwa momentum reformasi telah menghantarkan Elit lokal mengonsolidasikan kekuatan identitas (suku) untuk menolak kepala daerah yang berasal dari non-sukunya. Hal ini tampak dengan jelas dalam fenomena pembentukan kabupaten baru, di sini, para Elit etnis berupaya memisahkan atau melepaskan diri dari kabupaten induknya dengan alasan distingsi sejarah kebudayaan, agama dan sukunya, (Sjaf, 2014).

Kehadiran politik identitas di Indonesia tentunya tidak semata-mata bertumpu pada perubahan politik nasional yang pada awalnya bersifat sentralistik dengan kendali rezim Orde Baru dan mendorong lahirnya otonomi daerah serta berkembangnya politik identitas di seluruh Indonesia. Potensi besar yang dimiliki kekuatan suku di tingkat lokal tentunya dipengaruhi oleh kepentingan politik nasional, sehingga, untuk meloloskan kepentingannya, maka, isu suku dipandang lebih mempunyai peluang. Untuk itu, proses penggarapan dukungan massa menjadi target utama propaganda Elit, sehingga isu suku dapat terus direproduksi dan dimainkan dengan secara masif. Salah satu persoalan yang muncul sebagai implikasi dari menguatnya isu suku adalah adanya perasaan sentimen suku tertentu atas berkuasanya suku lain di suatu wilayah. Akibatnya, masyarakat merasa terpinggirkan dalam wilayah ekonomi ataupun politik keterbatasan akses tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan upaya mengkonsolidasikan identitas dengan memilih suku sebagai kendaraan untuk mempertahankan sukunya, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pemilihan kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 tidak dapat dipisahkan dari fenomena politik identitas dari ketiga suku swapraja tersebut yakni, Swapraja Biboki, Insana, dan Miomaffo. Keterlibatan kombinasi suku terlihat dari ketiga pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada di kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020, ini yang menjadi alasan peneliti menjadikan kabupaten Timor Tengah Utara sebagai lokasi penelitian karena melihat dari faktor suku tersebut.

Dalam Pilkada kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 diikuti oleh tiga (3) pasangan calon, diantaranya calon pertama Kristina Muki, S.Pd.,M.Si dari suku Miomaffo yang berpasangan dengan Yosef Tanu, S.STP., M.Si dari suku Insana yang didukung oleh partai NasDem dengan tagline “Kita Sehati”, pasangan calon kedua (Alm) H. Frengky Saunoh, SE dari suku Insana yang berpasangan dengan Drs. Amandus Nahas dari suku Miomaffo yang didukung oleh partai PDI-P, Hanura, Perindo, Demokrat, Berkarya, PKS, dan PAN dengan tagline “Fresh”, pasangan calon ketiga Drs. Juandi David dari suku Biboki yang berpasangan dengan Drs. Eusabius Binsasi dari suku Miomaffo yang didukung oleh partai Golkar, PKB, Gerindra, dan PSI dengan tagline “Desa Sejahtera”. Berbagai upaya dilakukan agar memperoleh dukungan politik di Pilkada kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 para pasangan calon menghalalkan segala cara untuk bisa memikat pemilih. Salah satu strategi yang paling ampuh adalah memanfaatkan identitas politik. Setiap pasangan calon berusaha mendekati masyarakat dengan isu-isu suku yang dibangun sehingga memobilisasi massa untuk meraup dukungan politik.

Terlepas dari hal tersebut, berbagai konflik politik mulai bermunculan sebelum adanya pergelaran pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020. Tak terlepas dari isu politik suku dan politik kepentingan juga wajib disorot. Dari semua calon kepala daerah dalam perhelatan Pilkada 2020 Kristina Muki-Joseph Tanu merupakan pasangan yang cukup mendapat perhatian publik, utamanya ASN dan komunitas suku dan perempuan. Pasangan ini, jauh sebelum proses dan tahapan Pilkada sudah sering

berjalan kemana-mana untuk sosialisasi, bahkan segenap ASN dan badan-badan independen (di TTU) pun mendapat ‘arahan’ agar mendukung pasangan calon no. urut 1 tersebut (Kompasiana, 2020). Berbagai konflik antar paslon sering terjadi terutama paslon no urut 1 “Sehati” dan paslon no urut 2 “Fresh”. Atas dasar kepentingan antar kelompok inilah sebagai pemicu berbagai konflik sebelum pergelaran pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020.

Dengan adanya kekuatan dan eksistensi identitas politik di tengah masyarakat memberikan dampak yang sangat besar dalam hal pemilihan umum, dengan minimnya pemahaman informasi bagi masyarakat hal ini dapat memberikan pengaruh yang cukup signifikan seperti contohnya dengan adanya politik identitas dalam kalangan masyarakat menegah ke bawah tentunya memberikan perubahan baik dalam kehidupan masyarakat itu sendiri maupun pencapaian-pencapaian program kerja serta harapan bagi masyarakat, sering kali dalam penerapan politik identitas tidak memberikan hasil yang baik terkhusus dalam upaya perwujudan program-program kerja, ada kalanya para kandidat yang memiliki potensi kerja tinggi akan terbelakang dalam pemilihan dikarenakan kuatnya eksistensi masyarakat dalam politik identitas.

Berkaitan dengan politik identitas tentu sudah menjadi hal yang dominan diperbincangkan dan menjadi topik yang sensitif dalam konstelasi politik lokal. Isu politik identitas dikatakan sensitif karena politik identitas menjadi virus integrasi bangsa karena pada tingkatan tertentu politik identitas menjadi sangat ekstrim. Sudah menjadi tugas setiap warga negara untuk mampu menjaga integrasi bangsa demi tercapainya Bounum Comune atau kesejahteraan bersama. Realitas diatas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Politik Identitas Suku dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Taekas, Kecamatan Miomaffo Timur)”.

Metode

Dalam mengumpulkan informasi dan menemukan hasil guna membahas masalah dari jurnal ini maka metode yang akan digunakan adalah metode studi kasus, yang dimana akan melakukan penelaah mendalam mengenai dampak politik identitas suku dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 studi kasus di Desa Taekas Kecamatan Miomaffo Timur. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang ada untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Hasil

Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Desa Taekas, Kec. Miomaffo Timur, tanggal 9 Desember 2020 berlangsung secara demokratis, transparan, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Pilkada kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 diikuti oleh 3 pasangan calon, diantaranya calon pertama Kristina Muki, S.Pd., M.Si dari suku Miomaffo yang berpasangan dengan Yosef Tanu, S.STP., M.Si dari suku Insana yang didukung oleh partai NasDem dengan tagline “Kita Sehati”, pasangan calon kedua Alm. H. Frengky Saunoh, SE dari suku Insana yang berpasangan dengan Drs. Amandus Nahas dari suku Miomaffo yang didukung oleh partai PDI-P, Hanura, Perindo, Demokrat, Berkarya, PKS, dan PAN dengan tagline “Fresh”, pasangan calon ketiga Drs. Juandi David dari suku Biboki yang berpasangan dengan Drs. Eusabius

Binsasi dari suku Miomaffo yang didukung oleh partai Golkar, PKB, Gerindra, dan PSI dengan tagline “Desa Sejahtera”.

Berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TTU, hasil perolehan suara pada Pilkada di Desa Taekas, Kec. Miomaffo Timur dimenangkan oleh pasangan calon No. Urut 3 dengan jumlah suara sebanyak 509 suara, diikuti oleh pasangan No. Urut 2 sebanyak 294 suara, dan pasangan No. Urut 1 dengan jumlah 151 suara. Perolehan jumlah suara di atas berdasarkan 4 TPS dari 9 RT dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 940 orang.

Pembahasan

Peran politik identitas suku dalam penerapannya sangat sistemis dan terorganisir yakni seperti merangkul individu yang berdasarkan kesamaan suku untuk menguatkan basis kemenangan. Realitas politik identitas tersebut sudah turun temurun atau sesuatu yang Given. Masyarakat dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecenderungannya adalah orientasi suku. Pada masyarakat yang mayoritas etnis dawan seperti di desa Taekas menjadi sangat mungkin dengan melihat realitas politisasi suku yang dilakukan oleh orang-orang berkepentingan. Berdasarkan teori instrumentalisme, elit-elit yang kerap menggunakan identitas suku dalam penyelenggaraan kontestasi tersebut adalah dengan melihat struktural masyarakat yang tersusun berdasarkan klasifikasi suku. Jika melihat strategi elit-elit politik di desa Taekas sangat terorganisir, pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam ruang sosialisme dilakukan secara intens. Dari pendekatan instrumentalisme tersebut menjelaskan bahwa makna politik suku dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi suku dalam rangka mengejar kepentingan politik. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward Aspinall (2011) yang menjelaskan bahwa politik suku merupakan upaya untuk melakukan mobilisasi atau menggunakan suku dengan berdasarkan pada kesadaran akan adanya perbedaan antar satu kelompok dengan kelompok lain. Upaya tersebut dilakukan untuk memperoleh kekuasaan negara, mempengaruhi kebijakan pemerintah, maupun mempengaruhi struktur dari institusi Negara. Teori instrumentalisme yang dicetus oleh Paul Brass dan David Brown, berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara reflektif dengan berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan (Widayanti, 2009: 21). Sehingga disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bergerak kepentingan, identitas yang pada mulanya adalah base on identity dan base on interest telah dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Jadi dasar terjadinya politik identitas karena adanya suatu kelompok yang memiliki berbagai kepentingan. Realitas politik identitas tersebut, dapat dilihat bahwa suku khususnya di desa Taekas dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen dalam mengejar keuntungan politik.

Hal ini dapat dilihat dari kutipan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama seorang Elit politik di Desa Taekas yaitu bapak Frederikus Korbafo (37 thn) sebagai berikut:

“Pada saat pemilu kami sebagai tim sukses ditugaskan untuk mencari massa dimana kami harus pintar merayu masyarakat agar mereka dapat memilih atau memberikan suara kepada paslon yang telah kami pegang. Dalam mencari massa kami biasanya menyampaikan visi dan misi dari pasangan calon tersebut kepada masyarakat. Dalam mencari massa kami juga sering sekali menggunakan isu etnisitas, yaitu dimana kami mengatakan bahwa mama dan bapa harus pilih kita punya orang Timor/dawan jangan pilih dari etnis atau orang lain karena kalau kita pilih orang lain bagaimana dia bisa datang dan perhatikan kita semua di kampung sini. Namun, dalam berjalannya waktu kami juga sering mengalami kesulitan dimana ada tim sukses dari paslon lain yang datang dengan menggunakan money

politics untuk merayu masyarakat yang ada di desa (hasil wawancara 28 Maret 2023).

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran Elit politik atau tim sukses sangatlah penting dimana mereka diharuskan meyakinkan masyarakat agar dapat memilih sesuai dengan apa yang sudah mereka sosialisasikan sebelumnya. Kemudian hal yang sama juga ditambahkan oleh salah seorang Elit politik, yakni Bapak Eduardus Foni (63 tahun), disampaikan bahwa:

“Saya sebagai salah satu tim sukses juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Edi, dimana kita sebagai tim harus pintar putar otak, bagaimana masyarakat itu memilih kita sebagai target utama dalam menyampaikan visi dan misi di situ kami juga menggabungkan dengan isu-isu identitas etnis yang ada, dimana kami mengatakan yang menjadi hal dasar yaitu etnis dan itu sudah menjadi tradisi orang Timor. Kalau bapak dan mama pilih orang luar bagaimana mereka bisa lihat kita orang Timor yang tiap hari di kebun dari pagi sampai malam, mereka tidak mungkin datang untuk melihat daerah kita yang jauh dan infrastruktur minim seperti ini, jadi lebih baik kita memilih anak kita orang Timor asli supaya dia lebih memerhatikan kita di kampung karena dia juga sudah pernah rasa dan tinggal bersama dengan kita di kampung ini (hasil wawancara 28 Maret 2023).

Dari hasil wawancara diatas peneliti melihat bahwa adanya sebuah tindakan manipulasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh Elit politik sehingga mereka dengan mudah dalam mencapai tujuan dan kepentingannya bersama.

Teori dominasi sosial mengidentifikasi beberapa mekanisme hierarki telah dikembangkan dan dipertahankan. Orang dengan dominasi sosial yang tinggi adalah orang yang percaya bahwa kehidupan terbagi ke dalam struktur yaitu yang di atas dan yang di bawah. Mereka yang di atas adalah mereka yang menang, memiliki kekuasaan, atau memiliki seluruh nilai-nilai yang positif. Terbentuknya konstruksi sosial yang membuat suatu kelompok atau individu menonjol dikarenakan suatu karakteristik tertentu, contohnya ras, suku, kelas sosial, agama, dan lain sebagainya. Berdasarkan teori Sidanius dan Pratto, konsep terbesar dari kerangka berpikir orientasi dominasi sosial terdiri atas tiga asumsi. Asumsi pertama adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang cenderung disusun berdasarkan kelompok-kelompok hierarki, dimana paling tidak terdapat satu kelompok atau individu yang berada di atas dan satu kelompok atau individu lain yang berada di bawahnya. Asumsi kedua, hierarki atau tingkatan dapat didasarkan pada usia, jenis kelamin, kelas sosial, ras, kebangsaan, agama, dan karakteristik lainnya yang mungkin dapat digunakan sebagai pembeda di antara kelompok atau individu yang berbeda. Asumsi terakhir, masyarakat secara individu harus menyeimbangkan kekuatan yang ada di dalam dirinya, yaitu diantara satu hierarki kelompok atau individu menuju kelompok hierarki atau individu lain yang memiliki keseimbangan. Suku Miomaffo yang ada di Desa Taekas yang merupakan suku dominan menggunakan politisasi suku sebagai strategi memenangkan calon. Jumlah penduduk suku di desa Taekas yang dominan dimanfaatkan sebagai basis sehingga masyarakat preferensi memilinya berdasarkan suku Miomaffo.

Teori orientasi dominasi sosial yang dirumuskan oleh Sidanius dan Pratto pada tahun 1991, dirancang untuk menjelaskan sebab akibat dari hierarki sosial serta penindasan. Secara khusus teori dominasi sosial mencoba untuk menjelaskan mengapa masyarakat tampaknya didukung oleh suatu hierarki. Melihat Realita di desa Taekas suku dominan Miomaffo mendominasi kedudukan sebagai birokrat pemerintahan desa Taekas, kab. TTU. Hal tersebut merupakan tindakan politis demi mewujudkan keuntungan ekonomi politik dan lainnya.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menemukan suatu hal baru yang sangat dominan dimana dominasi dari suku Miomaffo di Desa Taekas sangat besar sehingga hal itu secara otomatis menjelaskan bahwa setiap suku asing yang menikah dengan suku Miomaffo di desa Taekas wajib mengikuti aturan yang telah disepakati bersama dalam melangsungkan pemilihan umum. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa suku yang berbeda di desa tersebut namun mereka memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suku yang mayoritas Miomaffo, dari beberapa suku tersebut yakni Flores, Belu dan Malaka.

Ost (1998) dalam *Solidarity And The Politics Of Anti Politics: Opposition And Reform In Poland Since 1968*, menyebutkan bahwa solidaritas politik merupakan gejala post-modern politik. Gejala ini ditandai dengan akomodirnya kekuatan sosial dalam politik. Ost melihat politik sebagai alat dan tujuan sekaligus. Karena sebagai alat dan tujuan sekaligus maka politik memang harus menyertakan banyak aspek di dalamnya. Banyak aspek itu harus disertakan agar Elit politik bisa mendapatkan kekuasaan dalam alam liberalisasi politik. Gerakan sosialisme semu dianggap mampu mencapai tujuan itu. Dengan demikian warga Desa Taekas sebagai konstituen dibuat dan dilakukan sama seperti logika sosialis. Berikutnya adalah menggunakan semua potensi dalam alam sosialisme itu untuk mencapai tujuan. Maka etnis digunakan untuk tujuan politik. Solidaritas politik diikat dengan tali sosial budaya di ruang sosialisme. Sosialisme semu adalah gejala dimana nilai sosialisme dipakai untuk tujuan politik. Dalam ruang Solidaritas Politik kegiatan politik diarahkan untuk tujuan kelompok bukan tujuan bersama. Jika dilihat dari gerak Elit politik di desa Taekas sulit untuk tidak mengatakan bahwa solidaritas politik kental menghiasi ruang politik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa masyarakat di dalam desa Taekas, oleh karena itu untuk meyakinkan para pembaca, penulis melampirkan beberapa kutipan hasil wawancara tersebut ke dalam tulisan ini yakni sebagai berikut: Pernyataan yang disampaikan oleh seorang tokoh adat Desa Taekas yaitu bapak Ferdy Abi (60 tahun) mengatakan bahwa:

“Politik identitas sangat jelas memiliki peranan penting dalam strategi memenangkan calon di Desa Taekas khususnya. Sebelum memilih calon kami berkumpul pada saat malam hari untuk menentukan pilihan yang akan kami lakukan nanti baik itu di dalam rumah atau lopo besar tempat biasa kami duduk untuk menentukan sesuatu dan setelah melakukan pertemuan tersebut, pilihan kami lebih mengarah kepada putra daerah yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan No. Urut 3 karena kalau kita memilih anak kita berarti nanti dia nantinya lebih memperhatikan desa ini” (hasil wawancara, 20 Maret 2023).

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa politik identitas di Desa Taekas sendiri sudah tidak bisa dihindari lagi, karena masyarakat di desa tersebut memilih sesuai dengan sistem keturunan atau kekeluargaan. Berikut juga pernyataan yang sama disampaikan oleh ibu Elfiana Sila (35 tahun) yang mengatakan bahwa:

“Suku Miomaffo di Desa Taekas, dengan penerapan strategi politik yang apik yaitu melakukan sebuah pertemuan di dalam etnis sangat intens dengan tujuan menyatukan komitmen bersama memenangkan pasangan calon dengan No. Urut 3 karena wakil bupati merupakan anak turunan langsung dari suku Miomaffo Timur”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemilihan paslon, masyarakat Desa Taekas dengan sistem identitas yang kuat, mereka menyatukan satu

pilihan yang kuat terhadap salah satu paslon yang dimana merupakan anak atau turunan langsung dari desa tersebut.

Politik identitas memiliki pengaruh yang sangat besar terkhusus pada masyarakat yang Multi sukuisme di Desa Taekas dengan dominasi suku Miomaffo yang tentunya sudah dimaknai sebagai instrumen dalam agenda politik. Berkaca dari sifat identitas yang dinamis, politik identitas selalu dikonstruksi dan dipertahankan secara reflektif berdasarkan perubahan kebutuhan dan kepentingan. Disaat identitas bergeser ke arah kepentingan yang berubah, bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politis. Dalam pengamatan peneliti yang berkaitan dengan dampak dari peran politik identitas tersebut terdapat satu bukti adalah dominasi posisi di dalam birokrasi pemerintahan Desa.

Dalam politik identitas terdapat proses yaitu, individu mengidentifikasi diri mereka dan orang lain. Ketika individu membentuk siapa dirinya maka secara otomatis ia akan mencari negasinya atau orang lain. Melihat kenyataan di lokasi penelitian serta tanggapan dari masyarakat Desa Taekas terkait dampak dari identitas politik dianggap sebagai hal yang lumrah. Justru di dalam dinamika penerapan politik identitas membuka ruang komunikasi di dalam masing-masing suku sehingga etnis memungkinkan tumbuhnya solidaritas kelompok. Meskipun di sisi lain tidak bisa kita lihat bagaimana pembelahan terjadi yaitu antar suku memiliki egoisme dan sifat sukuisme yang berimplikasi terjadinya konflik.

Politik identitas dalam kontestasi politik Pilkada di Desa Taekas menciptakan suatu kondisi dimana adanya integritas dalam suatu kelompok tapi di sisi lain terjadinya suatu disintegritas atau perpecahan antar kelompok. Disintegritas atau konstelasi dalam perpolitikan tersebut dinilai tidak terlalu mengancam kehidupan sosial masyarakat setempat sehingga tidak memerlukan suatu proses hukum dalam menangani persoalan tersebut. Satu hal yang menjadi pemicu konflik adalah kesadaran semua anggotanya terhadap suatu kelompok suku yang berlebihan terhadap kelompok suku yang lainnya. Sikap seperti ini, mencerminkan keberpihakan yang berlebihan terhadap kelompok sukunya yang dapat mengganggu kontak keguyuban antar suku, bahkan bisa menimbulkan diskriminasi, buruk sangka, kekerasan dan konflik antar suku. Politik identitas sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk memenangkan kontestasi melainkan ada hal-hal lain yang ingin dicapai yaitu melakukan dominasi kekuasaan ketika menjabat sebagai kepala daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Politik Identitas Suku Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 yang terjadi di Desa Taekas Kec. Miomaffo Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, bahwa dalam kontestasi pilkada di Kab. TTU khususnya di Desa Taekas telah terjadi yang namanya politisasi identitas suku. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa masyarakatnya mayoritas suku Miomaffo sehingga orang-orang yang berkepentingan menjadikan potensi tersebut sebagai instrumen dalam mencapai kekuasaan. Wujud dari politisasi suku ini adalah, masyarakat di Desa Taekas memilih sesuai dengan sukunya dimana tujuannya adalah untuk menguatkan basis suku mereka. Politik identitas suku sebagai alat dalam memanipulasi dan memobilisasi massa menciptakan 2 dampak dimana mampu menguatkan integritas dalam suku dan juga menimbulkan disintegritas dalam masyarakat. Realitas politik identitas tersebut sudah turun temurun atau sesuatu yang *given* yang telah terjadi di Desa Taekas dalam melakukan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara. Masyarakat dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecenderungannya adalah orientasi suku.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Revisi V)*. PT Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada.
- Cressida J. Hayes. 2007. *Self-Transformation : Foucault, Ethics and Normalizes Bodies*. Oxford University Press.
- Haralambos, M & Holborn, M. (2008). *Sociology: Themes and Perspectives*. London: Harper Collins Publications Limited
- Heller, A dan Punsher, S. (1995). *Biopolitical Ideologies an Their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies*. Blackwell Oxford.
- Jenkins, R. (2008). *Social Identity*. Routledge: New York
- Johnston, H., Larana, E., & Gusfield, J. R. (1994). *New Social Movements: From Ideology to Identity* (pp.3-35). Philadelphia: Temple University Press
- Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
- Morissan. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Kencana (Prenadamedia Group).
- Nawawi, H. & Hadari, M. (2005). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudijono, A. (1996). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alvabet CV.
- Suparlan, P. (2004). *Hubungan Antar Suku Bangsa*. KIK Press: Jakarta.
- Widayanti, Titik. 2009. *Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria*. UGM: Yogyakarta.
- Castells, M. (2003). *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*. Vol II. Blackwell Publishing: Australia.
- Lestari, Y. S. (2018). *Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme da Agama*. *Journal of Politics and Policy*, 1 (1), 19-29